



Pemilu di Aceh

Balai Pelestarian
Nilai Tradisional

0.5
JUL

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

2004 **31**

Haba

Informasi Kesejarahan
dan Nilai Tradisional

No. 31 Th. V
Edisi April – Juni 2004

PELINDUNG

Deputi Bidang Pelestarian dan Pengembangan
Kebudayaan Kementerian Budpar
Asisten Deputi Urusan Tradisi
Kementerian Budpar

PENANGGUNG JAWAB

Kepala Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

DEWAN REDAKSI

T. Mohd. Djuned
Rusdi Sufi
Aslam Nur

REDAKTUR PELAKSANA

Koordinator Kelompok Jabatan Fungsional
Irvan Setiawan
Sri Waryanti
Hasimi

SEKRETARIAT

Kasubbag TU
Bendaharawan Rutin
Makmun Abdullah
Yulhanis
M. Saleh
Azizah
Netti Darmi
Cut Nadia Fitriana
Cut Zahrina

ALAMAT REDAKSI

Jln. Tuanku. Hasyim Banta Muda 17 Banda Aceh
Telp. (0651) 23226, 24216
Faks. (0651) 24216

Diterbitkan oleh :

Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional
Banda Aceh

Redaksi menerima tulisan yang relevan dengan
misi Balai Kajian Jarahnitra Banda Aceh dari
pembaca 4-8 halaman diketik 2 spasi, roman 12,
ukuran kwarto. Redaksi dapat juga menyingkat
dan memeriksa tulisan yang akan dimuat tanpa
mengubah maksud dan isinya

ISSN : 1410 - 3877

STT : 2568/SK/DIT.JEN PPG/STT/1999

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Info

Pelaksanaan Kegiatan BKSNT Banda
Aceh di Sumatera Utara

Wacana

- Sudirman Meretas Jalan Penuh Pembatas : Pemilu
1955 – 2004 di Aceh
- Sri Wahyuni Dinamika Pelaksanaan Pemilu 2004 di
Nanggroe Aceh Darussalam
- Seno Fenomena Memilih dan Pengaruhnya
Terhadap Melonjaknya Perolehan Suara
Partai Demokrat dan Partai Keadilan
Sejahtera Dalam Pemilu 5 April 2004 di
Banda Aceh
- Titit Lestari Pemilu dan Good Governance di Aceh
- Sri Waryanti Netral atau Mendua (Posisi PNS NAD
pada Pemilu 2004)

Cerita Rakyat

Nenggeri Ujung Denie

Pustaka

Biografi Ulama-ulama Aceh Abad XX
Jilid I

Cover

Desain cover Iskandar EP

Tema Haba No. 32

Tahun Budaya Prov. NAD

PENGANTAR

Redaksi

Hajatan besar Pemilu telah dilalui, para kontestan juga saat ini nota bene telah menerima hasilnya namun melihat kebelakang apakah Pemilu kita tahun 2004 ini adalah Pemilu tersukses yang pernah dimiliki, itu bisa dilihat dari berbagai sudut pandang, yang jelas pesta demokrasi telah digelar apapun hasilnya harus diterima dengan lapang dada.

Selanjutnya bangsa Indonesia siap-siap melanjutkan pemilihan presiden dan wakil presiden, para pendukung Capres dan Cawapres siap-siap bersorak mengelu-elukan jago-jago mereka. Perlu diingat saat ini rakyat Indonesia sedikit demi sedikit telah belajar tentang demokrasi. Oleh karena itu, rakyat sendirilah yang seharusnya menentukan kemana bangsa dan negara ini akan dibawa. Memilih dengan hati nurani lebih penting daripada memilih karena terpesona oleh janji (Idw).

Redaksi

Pelaksanaan Kegiatan BKSNT Banda Aceh di Sumatera Utara

Dalam kurun waktu April sampai dengan Juni 2004, Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional telah melaksanakan beberapa kegiatan di Sumatera Utara. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan adalah Koordinasi Pembinaan Nilai Budaya, Sarasehan Nilai-Nilai Budaya, dan Lokakarya Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sejarah bagi Guru-Guru di Sumut. Seluruh kegiatan dilaksanakan di Kota Medan Sumatera Utara.

Adapun pembicara kegiatan Koordinasi Pembinaan Nilai Budaya adalah Dr. Abdurrahman (Asdep Urusan Kepercayaan Menbudpar); Dr. F. Ezra Munthe, M.Sc. (Kadisbudpar Sumut); Drs. Ngainehi Sembiring (Budayawan Sumut); Drs. Kocsocmo Hartami (Ketua Umum HPK Pusat); Thomson Siagian, SH (Kejaksaaan Tinggi Sumut); Kurnia, SH (Kanwil Kehakiman Sumut). Bertindak sebagai moderator kegiatan ini adalah Drs. Shabri A. (Ka. BKSNT Banda Aceh) dan Amran Prawoto, S.Pd. (Pih. Kasubdis. Bina Kesenian dan Nilai Budaya Budpar Sumut).

Seluruh peserta kegiatan Koordinasi Pembinaan Nilai Budaya adalah wakil dari himpunan kepercayaan se-Prov. Sumut dengan jumlah seluruhnya adalah 50 peserta. Mereka menggunakan sesi tanya jawab untuk mengeluarkan aspirasi dalam bentuk pertanyaan dan saran kepada pembicara. Inti dari sesi ini adalah perlunya kegiatan seperti ini di masa yang akan datang. Selain itu, perlu juga bentuk-bentuk kegiatan terapan lainnya yang berfungsi untuk mengarahkan masyarakat penganut kepercayaan agar sejalan dengan peraturan perundangan Indonesia. Di antara bentuk terapan yang menjadi pilihan adalah inventarisasi penganut kepercayaan se-Sumut.

Kegiatan Sarasehan Nilai-Nilai Budaya dihadiri oleh peserta dari berbagai himpunan penganut kepercayaan se-Prov. Sumut. Pembicara yang mengisi kegiatan ini

adalah Dr. F. Ezra Munthe, M.Sc. (Kadisbudpar Sumut); Ir. Maruli Sirait (Ketua HPK Sumut); Drs. Timbul Dongoran (Budayawan); Prof. Ahmad Samin (Budayawan/Akademisi); Dr. Nur Ahmad Fadli (Budayawan/Akademisi); dan Staf dari Kejaksaaan Tinggi Sumut). 2 orang Moderator kegiatan adalah Drs. Husein Ritonga (Staf Disbudpar Sumut) dan Dra. Morina Meliala (Staf Disbudpar Sumut).

Sesuai dengan nama kegiatan, Sarasehan Nilai-Nilai Budaya peserta banyak melakukan tanya jawab yang bersifat mempererat tali silaturahmi antar himpunan pengurus kepercayaan se Sumatera Utara. Selain itu, setelah kegiatan ini harapa peserta adalah agar dapat membangun dan melestarikan nilai-nilai budaya yang terkandung dengan merujuk pada peraturan yang ada di Indonesia.

Kegiatan Lokakarya Penulisan Karya Tulis Ilmiah Sejarah bagi Guru-Guru di Sumut dihadiri oleh 50 peserta, 6 pembicara dan 2 moderator. Adapun pembicara yang dimaksud adalah Dr. Susanto Zuhdi (Asdep Ur. Sejarah Nasional Bidang PP Menbudpar); Dra. Fatimah, SU (Ketua Jurusan Sejarah Fak Sastra USU); Dr. Ichwan Azhari (Dosen UNIMED); Dra. Ratna, MS (Dosen Jurusan Sejarah Fak Sastra USU); Drs. Suprayitno (Dosen Jurusan Sejarah Fak Sastra USU); Drs. Gustanto (Ketua MSI Cabang Sumut). Bertindak sebagai moderator adalah Drs. Haris Sutan Lubis (Dosen Jurusan Sejarah Fak Sastra USU) dan Drs. Hendra Mulia (Dosen STIE Harapan).

Peserta kegiatan ini antusias mengikuti apa yang dipaparkan pembicara. Hal ini disebabkan kepentingan peserta sendiri untuk menggali dan menambah pengalaman mereka dalam bidang penulisan sejarah yang digunakan untuk membuat karya tulis yang menjadi kewajiban mereka.

(VC)

Meretas Jalan Penuh Pembatas : Pemilu 1955 – 2004 di Aceh

Oleh Sudirman

Pendahuluan

Pada tanggal 22 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengeluarkan tiga buah keputusan penting, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia, Pembentukan Partai Nasional Indonesia dan Badan Keamanan Rakyat (BKR). KNPI kemudian dibentuk dan anggotanya dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945. Sidang KNIP yang pertama berlangsung di Jakarta pada tanggal 16 Oktober 1945, dalam sidang tersebut diambil keputusan yaitu mengusulkan kepada presiden supaya KNIP diberi hak legislatif selama Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belum terbentuk. Pada hari itu juga dibahas pembentukan Badan Pekerja KNIP. Usul pembentukan Badan Pekerja KNIP (BPKNIP) itu disampaikan kepada wakil Presiden dan pada hari itu juga Wakil Presiden mengeluarkan Maklumat Wakil Presiden No. X yang isinya : bahwa Komite Nasional Indonesia Pusat sebelum terbentuk MPR dan DPR diserahkan kekuasaan legislatif dan ikut menentukan Garis-Garis Besar Haluan Negara serta menyetujui bahwa Pekerja Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubungan dengan pentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan yang bertanggung jawab kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Maklumat tersebut ditandatangani Wakil Presiden, Muhammad Hatta. Atas usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah, yaitu supaya rakyat diberi kesempatan seluas-luasnya untuk mendirikan partai politik. Untuk itu keluarlah maklumat pemerintah tentang pembentukan partai

politik pada tanggal 3 November 1945, yang berbunyi sebagai berikut :

Maklumat Pemerintah:

Partai Politik. Anjuran pemerintah tentang pembentukan partai-partai politik. Berhubungan dengan usul Badan Pekerja KNIP kepada pemerintah, supaya diberikan kesempatan kepada rakyat seluas-luasnya untuk mendirikan partai-partai politik dengan restriksi bahwa partai-partai politik itu hendaknya memperkuat perjuangan kita mempertahankan kemerdekaan dan menjamin keamanan masyarakat. Pemerintah menegaskan pendiriannya yang telah diambil beberapa waktu yang lalu bahwa :

1. Pemerintah menyukai timbulnya partai-partai politik karena dengan adanya partai-partai itulah dapat dipimpin ke jalan yang teratur segala aliran faham yang ada dalam masyarakat.
2. Pemerintah berharap supaya partai-partai politik itu telah tersusun sebelum dilangsungkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakyat pada bulan Januari 1946.

Jakarta, 3 November 1945
Wakil Presiden
Muhammad Hatta

Sesuai dengan himbauan maklumat tersebut di atas maka dalam waktu singkat terbentuklah partai-partai politik, seperti Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Buruh Indonesia, Partai Rakyat Jelata, Partai Kristen Indonesia (Parkindo), Partai Rakyat Sosialis, Partai Sosialis Indonesia, Partai Katolik Republik Indonesia serta Partai Nasional Indonesia.

Begitu besar pengaruh pembentukan KNIP pada waktu itu, sehingga pada tanggal 14 November 1945, kabinet RI pertama yang presidenstil berubah menjadi kabinet perlementer. Perubahan tersebut merupakan penyimpangan dari UUD 1945. Akibat dari itu, kabinet hingga tahun 1959 silih berganti dan menteri-menterinya menjadi rebutan partai-partai politik. Sesuai dengan keputusan pembagian wilayah Indonesia atas 8 provinsi maka Sumatera sebagai salah satu provinsi juga membentuk komite nasional. Sesuai dengan petunjuk Mr. Hermani (Wakil Menteri Dalam Negeri) dan Subandio (anggota BPKNIP) maka pada tanggal 12 April 1946 dibentuk Komite Nasional Sumatera yang juga disebut Dewan Perwakilan Sumatera dengan jumlah anggotanya 100 orang dan 10 orang di antaranya mewakili Aceh. Anggota Badan Perwakilan Sumatera ini dilantik pada tanggal 17 April 1946 di Bukittinggi. Dalam pelantikan itu disampaikan pengarah dari Wakil Menteri Dalam Negeri antara lain berbunyi sebagai berikut :

"Badan Perwakilan Rakyat hendaknya merupakan satu Badan Perwakilan yang murni, yang menghapuskan kepentingan sendiri dengan memajukan kesukaran-kesukaran rakyat dan masyarakat dengan secara jujur. Anggota Badan Perwakilan Rakyat yang akan membawa suara rakyat untuk menyelesaikan revolusi nasional dan sosial yang sedang dan akan berlangsung atas kedaulatan rakyat yang bersih.

Anggota Badan Perwakilan janganlah hendaknya menjadi amtenar atau menjadi pegawai tinggi yang beku, akan tetapi adalah sebagai pemimpin dan bapak rakyat dalam pemerintahan yang membawa Badan Perwakilan rakyat kepada standing yang tinggi dan internasional."

Kemudian dibentuk pula Badan Pekerja untuk itu sebanyak 5 orang, di antaranya Sutikno P mewakili Aceh. Pencantu anggota Badan Perwakilan tersebut berdasarkan rasio setiap 100.000 penduduk

diwakili oleh satu orang anggota. Seperti telah disebutkan di atas jumlah anggota perwakilan dari Aceh adalah sebanyak 10 orang, yaitu Sutikno P, Teungku Ismail Yakob, Amelz, Afan Daulay, Muhammad Ibrahim Daud, Karim Muhammad Gurjad, H. Mustafa Salim, Abdul Mukti dan Muhammad Abdul Syam.

Atas saran Dr. A.K. Gani dan Adinegoro kepada Teuku Nyak Arif di Aceh dibentuk pula Komite Nasional Daerah Aceh. Pada tanggal 28 Agustus 1945 Teuku Nyak Arif dipilih dan diangkat menjadi ketua Komite Nasional Daerah Aceh dengan wakil Tuanku Mahmud. Pada mulanya jumlah anggota sebanyak 58 orang namun kemudian ditambah dengan para bupati, sehingga berjumlah 65 orang. Seiring dengan itu terbentuk pula Komite Nasional Wilayah (tingkat kewedanan), yaitu di Sigli, Calang, Tapaktuan, Takengon, Langsa dan lain-lain. Ketika Teuku Nyak Arif memangku jabatan Residen Aceh pada tanggal 3 Oktober 1945 maka penggantinya selaku ketua Komite Nasional Daerah Aceh adalah Tuanku Mahmud.¹

Pada pertengahan bulan Januari 1946 dalam suatu revolusi sosial di Aceh, Teuku Nyak Arif disingkirkan oleh lawan-lawan politiknya dan sebagai penggantinya sebagai Residen Aceh ditunjuk Teuku Cik Muhammad Daud Syah.² Sedangkan Tuanku Mahmud diperbantukan pada Komisaris Pusat di Bukittinggi, meskipun tetap tinggal di Kutaraja. Jabatan Komite Nasional Daerah Aceh dijabat oleh Mr. S.M. Amin, yang mcrangkap sebagai ketua Badan Eksekutif dengan anggota : Sutikno P, Hasyim M.S., H.M. Zainuddin, Muhammad Hanafiah dan Raden Insun. Kemudian Badan Eksekutif itu diperbaharui dengan susunan anggotanya adalah ketua Teuku Cik Muhammad Daud

¹Rusdi Sufi dan Bachtiar Akob, *Catatan Peristiwa dan Pelaku Sejarah di Aceh*. (Jakarta : CV.IPA ABONG, 2001), hlm. 12-15.

²*Ibid.*, hlm. 16.

Syah, wakil ketua Mr. S.M. Amin, dengan anggota : Ali Hasjmy, Sutikno P, Amelz, Suratno dan T.M. Amin, sekretaris Kamarusid. Anggota Komite Nasional Daerah Aceh yang ditetapkan pada tanggal 5 Juni 1946 berjumlah 75 orang terdairi atas 4 kelompok, yaitu kelompok wakil-wakil partai/organisasi sosial, kelompok mantan ketua Komite Nasional Daerah kabupaten/kawedanan, kelompok para bupati dan kelompok cerdik pandai/orang terkemuka.

Kelompok yang pertama terdiri atas : Ali Hasjmy (Pesindo), A. Munir (Pesindo), Hasan (Pesindo), Amelz (Pesindo), Hasyim (PNI), Ny. Abdul Aziz (Perwari), Idham (Muhammadiyah), Teungku Muhammad Daud Beureu-eh (PUSA), Said Abubakar (Mujahidin), Nyak Haji (PNI), Akhmad (PSI), Muhammad Nurdin (PDK), Raden Saleh (PKI) serta Husin Yusuf (Komandan Divisi TRI).

Kelompok yang kedua adalah Suratno, Ahmad Abdullah (Pesindo), Nurdin, Yahya Meureudu (Pesindo), Teungku Zainal Abidin Lamno, A. Gani Bireun (Pesindo), Muhammad Saridin Lhokseumawe (Pesindo), M. Kasyim Lhoksukon (Pesindo), Saleh Yavas Tekengon (Pesindo), M. Said Blangkejeren, A. Rahman Kutacane, Teuku Zakaria Bakongan, Abdul Mufti Singkil (Pesindo), M. Rasidin Sinabang (Pesindo), Teuku Pulo Calang (Pesindo), T.M. Ali Idi, Karim M. Duryat Langsa serta H. Burham Jamil Kuala Simpang.

Kelompok bupati adalah Zaini Bakri Aceh Besar (pesindo), Teungku Abdul Wahab Sigli, Sulaiman Daud Lhokseumawe, T.A. Hasan Langsa (Pesindo), Abdul Wahab Tekengon, Ibnu Saadan Meulaboh dan M. Sahim Hasyimi Tapaktuan (Pesindo)

Kelompok orang yang terkemuka adalah Ali Hasan, M. Mahyuddin (Pesindo) M. Tahir, H.M. Zainuddin, Ibrahim (Pesindo), Kamarusid, Muhammad Hanafiah, Muhammad ZZ (Pesindo), Umar Husni (Pesindo), Usmansyah, P. Lemaluo (Pesindo),

Raden Suwadi, Teungku Ismail Yakub, Tuanku Johan Ali, H. Bustaman, M. Mukhtar, Mr. S.M. Amin, Nayan, Raden Insun, Sutikno P, Teuku Ali Lamlagang, Teungku Abdussalam, Teungku Abdurrahman Abdullah, Teuku Main, Thamin Amin, (Pesindo), Teuku Ahmad Syah, Teungku Syekh Abdul Hamid, S. Paruntu (Pesindo), Teungku Zamzami Yahya serta O.K. Dahlan.

Pada tanggal 15 April 1948, provinsi Sumatera dibagi menjadi tiga yaitu Provinsi Sumatera Utara (termasuk Aceh) dengan gubernurnya adalah Mr. S.M. Amin berkedudukan di Kutaraja, Provinsi Sumatera Tengah dan Provinsi Sumatera Selatan. Akibat dari itu terjadi pula berbagai perubahan dalam pemerintahan.

Dengan Maklumat Wakil Perdana Menteri No. 6/Des WKPM/1949, Aceh dijadikan satu provinsi tersendiri. Sebagai gubernur diangkat Teungku Muhammad Daud Beureu-eh Namun Provinsi Aceh ini tidak berlangsung lama dan digabung kembali dengan Provinsi Sumatera Utara.

Pada tanggal 29 Desember 1956 Provinsi Aceh dibentuk kembali dan daerah Aceh dibagi atas Kabupaten Aceh Besar, Kabupaten Pidie, Kabupaten Aceh Utara, Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Tengah, Kabupaten Aceh Barat, Kabupaten Aceh Selatan serta Kota Besar Kutaraja. Provinsi yang dibentuk untuk kedua kali itu secara resmi berdiri baru pada tanggal 1 Januari 1957. Tenggang waktu antara keputusan pembentukan provinsi hingga peresmianya digunakan antara lain untuk mempersiapkan calon gubernur. PSII mencalonkan Ali Hasjmy, Masyumi mencalonkan Teungku Abdul Wahab, PSI mencalonkan dr. Zainal Abidin, sedangkan yang lain tidak mengajukan calon. Hasil pemilihan mayoritas memilih Ali Hasjmy dan pelantikannya dilaksanakan pada tanggal 27 Januari 1957 dan bersamaan dengan itu dilantik pula anggota DPRD Aceh yang berjumlah 30 orang. Dari partai Masyumi 23

orang, Perti 4 orang, PNI 1 orang, Perkindo 1 orang dan PKI 1 orang.³

Pertimbangan jumlah anggota DPRD yang dilantik tahun 1957 berdasarkan kepada perolehan suara setiap partai dalam pemilihan umum yang diadakan oleh Kabinet Burhanuddin Harahap tahun 1955.

Pemilu 1955

Kekuatan partai-partai bercorak Islam dalam pemilu pertama di Aceh sangat menonjol. Fakta menunjukkan, mayoritas pemilih di wilayah yang saat pemilu 1955 diselenggarakan diikuti oleh 546.379 lebih mempercayakan aspirasi politik mereka kepada partai-partai Islam seperti Masyumi dan Perti.

Pada pemilu 1955 perolehan suara partai-partai Islam jika dikalkulasikan mencapai 90 persen. Proporsi yang demikian itu menempatkan Aceh sebagai salah satu kantong kekuatan partai Islam terbesar di tanah air. Sementara partai politik yang mengusung ideologi nasionalis, komunis dan sosialis menjadi tidak berdaya di Aceh.

Dari 48 partai politik maupun calon perorangan peserta pemilu, Masyumi menjadi pemenang mutlak. Sedikitnya tiga perempat (75,6 persen) suara diperoleh. Dari tujuh kabupaten/kota, dominasi Masyumi tampak di Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Besar, Aceh Tengah dan Aceh Barat, sedangkan di Aceh Selatan dimenangkan oleh partai Perti sekaligus menjadi urutan kedua dengan perolehan suara 13,6 persen.

Perolehan suara Masyumi dan Perti di Aceh tidak banyak menyisakan peluang bagi partai bercorak Islam lainnya. Partai Nahdatul Ulama (NU) yang secara nasional memiliki pengaruh besar, di Aceh hanya mampu mengumpulkan 4.769 suara atau di bawah satu persen. Dengan perolehan tersebut, partai itu menempati urutan

keenam. Demikian juga Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) hanya mampu menempati urutan kedelapan.

Besarnya perolehan suara partai bercorak Islam dengan sendirinya mengubur harapan partai berbasis ideologi non agama. Partai Nasional Indonesia (PNI) maupun Partai Komunis Indonesia (PKI), dua partai yang saling berebut pengaruh di sebagian besar provinsi tanpanya di Aceh tidak mampu berbuat banyak. PNI, misalnya, hanya mengumpulkan 3,3 persen suara. PKI bahkan hanya mampu meraih 1,4 persen saja. Proporsi yang diraih PKI masih di bawah perolehan Partai Kristen Indonesia (Parkindo) yang mampu menempati urutan keempat dengan porsi 1,6 persen suara.

Kondisi lebih tidak beruntung terjadi pada calon-calon perorangan. Di Aceh tidak satu pun tokoh perorangan meraih simpati masyarakat. Nama-nama seperti T Sjahrul Amani, Zentrato Taharo Taungoi, Daulay Baginda Kalidjungdung dan beberapa nama lainnya hanya mampu mengumpulkan puluhan orang pemilih.⁴

Pemilu 1971-1997

Sejarah perebutan kekuasaan membuktikan bahwa tidak mudah untuk menaklukkan rakyat Aceh. Kenyataan seperti itu berlaku pula dalam perebutan pengaruh politik masyarakat Aceh yang ditunjukkan oleh dinamika perolehan suara partai-partai politik dalam rentang pemilu 1971-1997, yaitu pemilu sepanjang era kepemimpinan Orde Baru.

Sekalipun menghadapi kekuatan Golkar sebagai kekuatan politik yang didukung oleh penguasa Orde Baru, para pemilih partai-partai Islam yang semenjak pemilu 1955 mendominasi perolehan suara, masih menunjukkan geliatnya pada beberapa pemilu berikutnya. Pemilu 1971, Golkar memang tampil menjadi pemenang. Dengan mengumpulkan 483.103 suara (49,7).

⁴ *Harian Kompas*, Kamis, 29 Januari 2004, III, 32.

Meskipun unggul sebenarnya jumlah tersebut terpaut tipis dari perolehan suara partai-partai politik bercorak Islam yang berfusi menjadi PPP di tahun 1973-dan mampu meraih 48,9 persen suara.

Di tingkat kabupaten/kota persaingan tampak sengit. Tidak ada satupun wilayah kabupaten yang dimenangkan oleh partai dengan proporsi mutlak. Hanya, ketika dikonversikan pada jumlah perolehan kursi legislatif, Golkar mampu merebut tujuh dari sembilan kursi, atau menguasai tujuh dari sembilan kota/kabupaten di Aceh.

Kekalahan perolehan suara pada tahun 1971 tidak menyurutkan semangat pendukung partai bercorak Islam. Hal itu terbukti, pada pemilu 1977 dan 1982 Aceh kembali terkuasai oleh partai-partai dimaksud. Pemilu 1977, misalnya, PPP mampu menjadi pemenang. Tidak kurang 57,5 persen suara diraih. Dengan proporsi tersebut, enam dari sepuluh kursi legislatif milik PPP. Golkar saat itu hanya meraih 41,3 persen suara atau hanya menguasai empat kursi. Kemenangan PPP dibuktikan pula pada saat pemilu 1982. Sekalipun dibandingkan pemilu sebelumnya suara yang dikumpulkan agak menurun namun PPP masih unggul (54,3 persen) dengan mendapatkan 15 kursi, Golkar 12 kursi dan PDI 1 kursi.

Kemenangan PPP tidak bertahan lama. Pemilu berikutnya, 1987-1997 kembali Golkar berjaya. Pemberlakuan daerah operasi militer juga tampaknya semakin memuluskan penguasaan Aceh oleh Golkar pada waktu itu. Dari 10 kabupaten/kota di Aceh, Golkar menguasai lebih separuhnya. Beberapa kabupaten yang sebelumnya menjadi basis kekuatan PPP mulai meluntur, tergantikan oleh kekuatan Golkar. Pada pemilu 1987, misalnya, Kabupaten Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tenggara, yang sebelumnya dikuasai oleh PPP menjadi wilayah Golkar. Begitupun pada pemilu 1992, bahkan pada pemilu 1997 tidak hanya di wilayah tersebut, pengaruh Golkar hingga ke Kabupaten Pidie dan Aceh Utara. Hanya di Kabupaten Aceh Besar satu-satunya yang tetap dikuasai PPP.

Sebenarnya, di antara sengitnya persaingan antara Golkar dan PPP, PDI sempat menguasai satu kabupaten. Kota Sabang, yang semenjak pemilu sebelumnya milik Golkar, pada pemilu 1987 mampu dikuasai PDI. Hanya, penguasaan itu tidak berlangsung selamanya, pada pemilu 1997 kembali dikuasai Golkar.

Pada pemilu 1987, PPP mendapatkan 15 kursi, Golkar 19 kursi dan PDI 2 kursi. Pemilu 1992, PPP mendapatkan 12 kursi, Golkar 21 kursi dan PDI 3 kursi. Sedangkan pemilu 1997, PPP mendapatkan 11 kursi, Golkar 23 kursi dan PDI 1 kursi.

Pemilu 1999

Runtuhnya kekuasaan Orde Baru dengan sendirinya membangkitkan kembali kekuatan politik partai-partai berbasis massa Islam di Aceh. PPP, merupakan partai politik yang paling banyak mendapatkan keuntungan atas perubahan tersebut. Pada pemilu 1999, PPP yang kembali mengubah asas partainya dari pancasila menjadi partai berasas Islam tampil sebagai pemenang. Partai ini mampu mengumpulkan 28,8 persen suara.

Di tingkat kabupaten dan kota, kemenangan PPP diperoleh di lima kabupaten, yaitu Aceh Besar, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Tengah dan Simeulu. Tujuh kabupaten/kota lainnya yang berada di sebelah utara, timur dan tenggara tidak dikuasai oleh PPP. Kondisi demikian mengingatkan kembali pada beberapa pemilu sebelumnya, kekuatan partai berbasis massa Islam unggul di pesisir selatan Aceh hingga Aceh Tengah.

Munculnya Partai Amanat Nasional (PAN) yang banyak didukung oleh tokoh Muhammadiyah semakin melengkapi kekuatan partai-partai politik yang mengandalkan massa Islam di Aceh. Pada pemilu kali ini, PAN merebut 17,9 persen suara. Dengan proporsi tersebut, partai ini menempati urutan kedua perolehan suara.

Aceh memang bukan milik partai-partai berideologi nasionalis. Dari 10 besar peraih suara, hanya tiga partai bercorak

³ H.M. Thamrin Z. "Sejarah dan Peranan Partai Politik di Aceh 1945-1997", makalah seminar: Balai Kajian sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997.

nasionalis yang tampil yaitu Partai Golkar, PDI Perjuangan dan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP). Dari segi perolehan suara pun kiprah partai-partai bercorak nasionalis itu tidak terlalu dominan. Kejayaan Partai Golkar, misalnya, di era Reformasi meluntur. Tampaknya pemilu 1997 merupakan kulminasi kemenangan Golkar di Aceh. Pada pemilu 1997 Golkar meraih 64,8 persen, pada pemilu 1999 merosot, tinggal 15,6 persen. Kendati demikian, Kota Sabang, Aceh Utara dan Aceh Tenggara masih dikuasai Partai Golkar. Di Kabupaten Aceh Utara kemenangan Golkar lebih dikarenakan tidak dapat diadakan pemilu sebab gangguan keamanan.

PDI Perjuangan pun tidak banyak berkutik di Aceh. Apabila secara nasional partai ini mampu memenangkan pertarungan, di Aceh hanya Kabupaten Aceh Timur yang berhasil dimenangkan. Proporsi yang diraih di wilayah ini pun tidak terpaut banyak dengan perolehan suara Partai Golkar. Jika PDIP meraih 27,8 persen suara, Partai Golkar mampu mengumpulkan 22,6 persen.

Selain PPP dan partai-partai benuansa Islam lainnya seperti Partai Bulan Bintang, Partai Nahdatul Umat, Partai Keadilan, Partai Persatuan dan Partai Abul Yatama juga mendapat simpati masyarakat Aceh. Proporsi yang diraih kelima partai tersebut memang masih tergolong kecil, di bawah lima persen. Namun, keberadaan mereka semakin melengkapi kejayaan partai-partai bercorak Islam di Aceh.⁵

Pemilu 2004

Untuk pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, dibuka kemungkinan pemungutan suara dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Pertama, pada hari Senin, 5 April 2004, pemungutan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak.

⁵*Ibid.*

Kedua, pada tanggal 5 Juli 2004 akan diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Ketiga, apabila pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama tanggal 5 Juli belum dapat ditetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih karena tidak ada pasangan calon presiden yang dapat meraih suara di atas 50 % maka pemungutan suara putaran kedua akan digelar pada tanggal 20 September 2004.

Memperhatikan perolehan suara pemilu semenjak tahun 1955 hingga tahun 1999, menunjukkan betapa loyalnya masyarakat di Aceh terhadap partai-partai yang menggunakan simbol keislaman. Memang, ada pula masa penurunan dukungan, sejalan dengan semakin kuatnya penguasaan rezim Orde Baru. Partai Golkar, sebagai kekuatan politik yang dibentuk dan didukung penguasa saat itu sempat berjaya. Namun, kondisi tersebut hanya berlangsung dalam satu dasawarsa dan kemudian berbalik kembali bersamaan dengan keruntuhan rezim.

Pemilu 2004 diikuti oleh 24 partai politik, yaitu : PNI Marhaenisine dengan ketuanya untuk Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam ialah Drh. M. Yani Amd. Partai Sosial Buruh Demokrat (PSBD) dengan ketua Taufiq Ibrahim, Partai Bulan Bintang (PBB) dengan ketua Drs. H.M. Daud Mansur, Partai Merdeka dengan Zuhaimi Agam, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dengan ketua Tgk. Zainal Abidin, Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan (PDK) dengan ketua Drs. H.M. Djakfar, M.Si., Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) dengan ketua Ir. T.M. Zulfikar, Partai Nasional Banteng Kemerdekaan (PNBK) dengan ketua Tanur Arnoja, Bsc., Partai Demokrat dengan ketua Mirwan Amir, Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dengan ketua Firmandez, S.E., Partai Pencegak Demokrasi Indonesia (PPDI) dengan ketua. Nazaruddin Abdullah, Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Indonesia (PPNUI) dengan ketua Prof. Dr. Muhibuddin Wali, M.A., Partai

Amanat Nasional (PAN) dengan ketua Ir. H. Azwar Abubakar, M.M., Partai Karya Peduli Bangsa (PKPB) dengan ketua Dr. Tgk. M. Yamin Amin, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan ketua H. Afdhal Yasin, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dengan ketua H. Raihan Iskandar, Lc., Partai Bintang Reformasi (PBR) dengan ketua Drs. Ameer Hamzah, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dengan ketua H.T. Bachrum Manyak, Partai Damai Sejahtera (PDS) dengan ketua Alfian, Partai Golongan Karya (Partai Golkar) dengan ketua H. Sayed Fuad Zakaria, S.E., Partai Patriot Pancasila dengan ketua H. Hussaini Oebit, S.H., Partai Sarikat Indonesia (PSI) dengan ketua H. Nur Nikmat, Partai Persatuan Daerah (PPD) dengan ketua H.T. Bantasyam Ali, S.H., Partai Pelopor dengan ketua Ir. Fansyah, S.H.⁶

Pelaksanaan pemilu 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam sangat berbeda sikap masyarakat dengan pemilu 1999, apabila pada pemilu 1999 banyak elemen masyarakat yang menolak pemilu di Aceh, sehingga terjadi pro dan kontra pelaksanaan pemilu 1999 di Aceh. Namun, pada pemilu tahun 2004 ini hampir tidak ada elemen masyarakat yang menolak pelaksanaan pemilu di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kecuali dari kelompok Gerakan Aceh Merdeka. Hal itu mungkin karena masyarakat trauma dengan keadaan dan situasi yang sedang berkembang di Aceh.

Secara umum pelaksanaan pemilu 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam berjalan lancar dan aman, walaupun ada beberapa persoalan yang muncul, seperti gangguan keamanan oleh GAM, ijazah palsu, isu caleg perempuan, masalah pemilih yang buta huruf, kecurangan dalam perhitungan suara, kampanye di luar jadwal, manipulasi biodata caleg, politik uang dan sebagainya.

Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam beberapa daerah

⁶*Harian Serambi Indonesia*, Kamie, 19 Februari 2004, hlm. 16.

pemilihan. Daerah pemilihan anggota DPRD kab./kota se-Nanggroe Aceh Darussalam pada pemilu 2004, terdiri atas 20 daerah pemilihan dengan memperebutkan 555 kursi. Untuk daerah pemilihan anggota DPRD Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dibagi dalam delapan wilayah pemilihan dengan memperebutkan 69 kursi. Sedangkan untuk anggota DPR-RI dibagi dalam dua wilayah pemilihan dengan memperebutkan 13 kursi.⁷

Pada pemilu 2004, pola dukungan serupa seperti pada pemilu sebelumnya masih terjadi di Aceh. Dari 69 kursi DPRD NAD yang diperebutkan oleh 24 kontestan peserta pemilu, hanya 11 partai politik yang mendapat kursi di DPRD NAD. Kesebelas partai politik itu adalah PPP 12 kursi, PBB 8 Kursi, Partai Demokrat 6 kursi, PKPI 1 kursi, PNUI 2 kursi, PAN 9 kursi, PKB 1 kursi, PKS 8 kursi, PBR 8 kursi, PDIP 2 kursi, Partai Golkar 12 kursi.⁸

Calon Anggota DPRD NAD yang terpilih itu adalah : M. Jamal Yunus, S.H., Ir. Hamdani Hamid, Surya Umri, S.E., A. Ridwan M. Dallah, SE., Tgk. Haji Ishak Kasem, Drs. Rusli Abdussamad, Drs. Zulkarnain, serta Drs. Saifuddin Samin, anggota dari Partai Bulan Bintang (PBB). Tgk. Haji Muhammad Faisal Amin, Drs. M. Gade Salam, Drs. Bahrom Muhammad Rasyid, Abdullah Saleh, S.H., Tgk. Haji Zainal Abidin, Basrun Yusuf, S.H., Tgk. Haji Rasyidin Abdullah, Burhanuddin, S.H., Haji Murhaban Makam, Hajah Zainab AR, B.A., Ir. Saidi Hasan Porang, serta Muzakki Salha, anggota dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). M. Ali Yacob, Amir Helmi, S.H., Yusrizal Ibrahim, Ir. Miryadi Amir, Drs. Jamaluddin T. Muku, Haji Teuku Iskandar Zulkarnain, anggota dari Partai Demokrat. Syafruddin Budiman dari Partai Keadilan dan Persatua Indonesia (PKPI). Tgk. Ilyas

⁷ *Tabloid Berita Kontras*, No. 269, Tahun VI, 4-10 Desember 2003.

⁸ *Harian Serambi Indonesia*, Kamis 29 April 2004.

Abdullah, S.Ag. dan Tgk. M. Yunus Manani dari Partai Nahdatul Ummah Indonesia (PNU).

Drs. H.K. Zainal Arifin, Haji Sayed Syarifuddin, S.E., Teuku Bustami Puteh, S.E., Asrul Abas, Ismaniar, S.E., Haji Waisul Qarani Aly, Ir. Rivolsa Ismail, Muslim Ayub, S.H., serta Almanar, S.H., dari Partai Amanat Nasional (PAN). Nasrul Musadiralsa, S. Ked., dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Haji Raihan Iskandar, Lc., Teuku Surya Darma, S.E., A.K., Bustanul Arifin, Maharriadi, S.T., S.Ag., Khairul Amal, S.E., Haji Fuady, S.T., Tgk. Mahyaruddin Yusuf, serta Irwansyah, dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Mukhlis Mukhtar, S.H., Drs. Tgk. Abdul Jamil Adnan, M. Ed., Drs. Tgk. Harmen Nuriqmar, Haji Basri Arita, Drs. Haji Tgk. Ameer Hamzah, Drs. Abdurrahman Ahmad, Syamsul Bahri, S.H., serta Drs. Yunardi Natsir, dari Partai Bintang Reformasi (PBR). Haji Teuku Bachrum Manyak dan H.T. Burdansyah, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Drs. Sulaiman Abda, Amir Fauzi Sab, Drs. H. Azhary Basar, M. Husin T. Banta, S.Sos., Ir. Haji Iskandar, H.E. Marthen Habib, Haji Sayed Fuad Zakaria, S.E., Maryani Ali Hajmy, Aminuddin, M. Kes., Jauharuddin Harmay, S.Sos., M. Si., Nurhalifah, S.H., serta Haji Adriman, dari Partai Golkar.⁹

Sedangkan anggota Dewan Perwakilan Daerah Nanggroe Aceh Darussalam yang terpilih ialah Drs. H.A. Malik Raden, M.M., Helmi Mahera Almujaahid, Adnan NS, serta Mediati Hafni Hanum, dari 27 orang yang ikut mencalonkan diri pada pemilu 2004.

Penutup

Kemenangan Masyumi dalam pemilu tahun 1955 hanya tinggal kenangan dalam lipatan sejarah karena Masyumi

dibubarkan oleh pemerintahan Soekarno dan tidak diberi kesempatan hidup lagi pada masa pemerintahan Soeharto. Kekuatan Perti yang pada mulanya kompak kemudian pecah menjadi dua haluan. Sebagian yang mendukung Golkar menamakan diri dengan Tarbiyah, sedangkan nasib Perti yang di PPP hampir dapat dikatakan ruyam karena massanya banyak yang ke Tarbiyah.

Nahdatul Ulama, pada mulanya kurang berkembang di Aceh karena ada saingannya yaitu Perti. Terlebih menjelang pemilu, nasib NU di Aceh kurang menggembirakan karena perpecahan di pengurus NU pusat. Pada mulanya memang kebanyakan anggota NU mendukung PPP namun kemudian beralih ke Golkar setelah Golkar dapat menguasai jalannya politik di Indonesia. Demikian juga halnya dengan organisasi Muhammadiyah, kalau pada masa jayanya Masyumi, Muhammadiyah pendukung utama Masyumi dan Parmusi namun kemudian anggotanya diberi kebebasan memilih salah satu dari ketiga kontestan pemilu. Bahkan salah satu pemimpin organisasi itu, Imam Suja, lebih condrong ke Golkar.

Hal yang demikian itu membuat Golkar dari waktu ke waktu bertambah kuat. Semenjak tahun 1977 partai tersebut sebagai kekuatan politik terbesar telah menguasai pemerintahan secara penuh, sehingga jalannya pemerintahan diwarnai oleh keinginan Golkar, sedang PPP dan PDI dapat dikatakan hanya sebagai pelengkap atau penonton saja.

Runtuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1999 membawa implikasi pada perubahan peta perpolitikan di Indonesia. Semenjak itu bermunculan berbagai partai politik dengan berbagai latar belakang landasan, sehingga partai politik peserta pemilu pada waktu itu mencapai 48 parpol. Banyak di antara organisasi keagamaan kemudian mendirikan partai sendiri, seperti organisasi NU mendirikan Partai NU dan PKB, organisasi Muhammadiyah mendirikan Partai Amanat Nasional, Jamaah Ikhwanul Muslimin mendirikan Partai Keadilan (pada

pemilu 2004 berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera karena pada pemilu 1999 tidak memenuhi *electoral threshold* (batas suara minimal) dan lain-lain.

Seperti telah disebutkan di atas pemilu 2004, merupakan sistem pemilu pertama yang dilaksanakan di Indonesia, dengan pemungutan suara tiga kali dalam setahun dan sebagai awal pemilihan langsung. Di Aceh pemilu 2004 berlangsung dalam situasi darurat militer. Walaupun

secara umum dapat berjalan dengan baik namun di sana-sini sedikit terdapat kekurangan terutama akibat gangguan keamanan.

Pola dukungan terhadap partai politik yang berlandaskan Islam masih terjadi di Aceh. Hal itu seperti yang telah disebutkan di atas, yaitu sebagian besar partai yang memperoleh kursi adalah partai yang berasaskan Islam.

Sudirman, S.S. adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

⁹ *Harian Waspada*, Kamis, 13 Mei 2004, hlm. 7.

Dinamika Pelaksanaan Pemilu 2004 di Nanggroe Aceh Darussalam

Oleh Sri Wahyuni

Pendahuluan

Untuk pertama kali dalam sejarah politik Indonesia, pemungutan suara dilaksanakan tiga kali dalam setahun. Pada hari Senin, 5 April 2004, pemungutan suara untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) tingkat provinsi dan kabupaten/kota secara serentak.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Juli 2004 akan diselenggarakan pemilu presiden dan wakil presiden secara langsung. Apabila pada pemilu presiden dan wakil presiden putaran pertama belum dapat ditetapkan pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, pemungutan suara putaran kedua akan digelar pada tanggal 20 September 2004.

Jika dilihat dari frekuensi pemilu yang berlangsung tiga kali setahun, maka pemungutan suara pada pemilu 2004 lebih banyak dibandingkan delapan penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Pemilu 1955, yang diakui paling demokratis dalam sejarah politik Indonesia, itu pun hanya berlangsung dua kali, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota DPR dan Desember 1955 untuk memilih anggota konstituante.

Pelaksanaan Pemilu 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam mempunyai dinamika tersendiri. Beberapa di antara dinamika pelaksanaan pemilu 2004 di Aceh yang sangat menonjol adalah Pemilu di tengah Darurat Militer, Gangguan Keamanan, Pemalsuan Ijazah, Issue Caleg

Perempuan, Issue Korupsi dan Pola Kampanye.

Dinamika yang penulis amati dan coba ketengahkan disini adalah dinamika yang berlangsung pada pelaksanaan pemilu tahap pertama tanggal 5 April 2004, saat pemilihan anggota legislatif.

Pemilu di tengah Darurat Militer

Status Darurat Militer di Nanggroe Aceh Darussalam membuat pihak pemerintah dan aparat keamanan Negara RI memberikan perhatian khusus dalam pelaksanaan pemilu 2004. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh Kapolri Jenderal Da'i Bahtiar bahwa Kepolisian RI menjamin tidak akan membiarkan kelompok manapun mengintervensi pelaksanaan hak suara setiap orang dalam Pemilu 2004, termasuk di NAD yang masih berstatus darurat militer.¹ Oleh karena itu, pemungutan suara yang dilakukan di Aceh diamankan oleh anggota polisi dan anggota Perlindungan Masyarakat (Linmas). Polisi dan Linmas ditempatkan dekat Tempat Pemungutan Suara (TPS), sedangkan TNI harus memberi jaminan bahwa daerah-daerah TPS tidak akan diganggu oleh kelompok-kelompok tertentu.

Pelaksanaan pemilu di tengah darurat militer terjadi pada pemilu putaran pertama tanggal 5 April 2004. Sedangkan putaran kedua dan ketiga untuk memilih calon presiden dan calon wakil presiden berlangsung dalam kondisi darurat sipil.

¹Tabloid Berita Kontras, No.281 Tahun V 26 Februari-3 Maret 2004. hlm.14

Gangguan Keamanan

Partisipasi pemilih di Aceh pada pemilu tahun 1999 yang lalu relatif minim. Hanya sekitar 33% dari 1,4 juta pemilih yang terdaftar. Ketua Panitia Pemilihan Daerah (PPD) I Aceh saat itu, Dr. Ahmad Farhan Hamid menyatakan, "minimnya partisipasi pemilih pada pemilu 1999, selain disebabkan maraknya ancaman dari GAM agar masyarakat jangan ikut pemilu, juga karena gencarnya kampanye boikot pemilu dari sejumlah buffer aksi mahasiswa seperti oleh Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) Aceh. Di samping alasan klasik: apatisme warga pada agenda pemilu."²

Adapun pelaksanaan pemilu 2004, bentuk gangguan keamanan dari aksi mahasiswa yang mengajak rakyat untuk tidak memilih (baca; golput) tidak ditemui, namun gangguan keamanan dari kelonipok bersenjata di Aceh masih tetap ada. Bentuk gangguan keamanan adalah berupa intimidasi supaya tidak datang ke TPS-TPS yang telah ditentukan. Selain itu menjelang hari pelaksanaan pemilu, ada panitia pemungutan suara yang harus kehilangan nyawa di Kabupaten Bireun, akibat gangguan keamanan.³

Pada tanggal 5 April 2004, masyarakat di NAD yang datang ke TPS-TPS terutama di pedesaan yang rawan gangguan keamanan, mereka harus berangkat pagi-pagi (sekitar jam 08.00 WIB) secara berombongan dengan membawa seluruh anggota keluarga ke TPS-TPS termasuk anak-anak. Selain membawa kartu pemilih, mereka juga membawa bekal berupa nasi bungkus dan air. Keberangkatan mereka dikoordinir oleh aparat kepolisian. Hal ini dilakukan untuk menghindari gangguan keamanan apabila

²Tabloid Berita Kontras, No.264 Tahun VI. Tanggal 30 Oktober - 5 November 2003. hlm. 22.

³Harian Serambi Indonesia, tanggal 6 April 2004

ada yang tinggal dikampung pada hari tersebut. Ketika pulang mereka juga dikawal oleh aparat kepolisian.⁴

Sedangkan pelaksanaan pemilu diwilayah "abu-abu" Aceh Besar, ada TPS yang didirikan di pos TNI dan anggota Linmas ditempatkan bukan hanya di TPS, tetapi juga untuk menjaga keamanan desa. Sekitar jam 07.30 TPS desa Lambireh, Sibreh, Aceh Besar telah dipenuhi masyarakat. Seorang wanita berumur 65 tahun menyampaikan bahwa ia khusus berpuasa pada hari pemilihan tersebut (5 April 2004) supaya pemilu berjalan aman, karena kalau ada keributan masyarakat kampung setempat ikut menanggung akibatnya.⁵

Sekitar 150-an warga dusun Alue Meuh berjalan kaki menyusuri jalan tanah berbatu di perbukitan Kecamatan Sawang, Aceh Utara. Tujuan mereka adalah Desa Gunci, sekitar 8 km dari Alue Meuh. "Sebagian kaum wanita membawa anak kecil sudah duluan berangkat kemarin" kata seorang warga Alue Meuh di TPS desa Gunci. Warga desa lainnya yang terletak di kaki bukit, seperti Teupin Ruseb dan Riseh Tunong juga sudah turun ke TPS yang ditentukan sehari sebelumnya. Perintah turun datang dari kepala dusun, kecuali yang sudah uzur. Anggota polisi berjaga-jaga dengan senjata laras panjang, sedangkan sejumlah anggota Linmas memegang pentungan. "Tadi malam ada ancaman bom disini. Tapi setelah disisir ternyata tak ada apa-apa" ujar seorang polisi.⁶

Untuk mengantisipasi gangguan keamanan ini, di Kota Banda Aceh, masyarakat juga ikut siaga. TPS-TPS yang telah didirikan, malamnya dijaga oleh warga masyarakat yang bergabung dalam kelompok

⁴Wawancara dengan Darmi (18 tahun) asal Paya Seunipat, Geurugok, Bireuen.

⁵Tabloid Berita Kontras No.287. Tahun V Tanggal 8-14 April 2004. hlm.5

⁶Ibid.,

jaga malam, Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan anggota Linmas. Sesekali aparat keamanan datang untuk memantau situasi.

Pemalsuan Ijazah

Keinginan untuk menjadi wakil rakyat yang terhormat dinodai oleh sikap tidak terpuji dari beberapa orang calon legislatif (caleg). Mereka menghalalkan segala cara untuk lolos persyaratan menjadi caleg dengan melakukan pemalsuan ijazah. Salah satu syarat untuk lolos menjadi caleg harus ada ijazah tingkat SMU. Tentu saja, bagi caleg yang tidak pernah menamatkan pendidikan pada jenjang tersebut berusaha memiliki ijazah. Ada yang melampirkan ijazah dari pesantren (tentu ini sah-sah saja kalau memang caleg tersebut pernah menjadi murid pesantren dimaksud), dan ada yang melampirkan ijazah SMU dari ibukota. Pemalsuan ijazah ditemui hampir seluruh Kabupaten/kota seperti di Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Timur, Aceh Singkil, Aceh Utara, Sabang, Pidie, Bener Meriah, Aceh Tamiang, dan Kota Langsa.

Masyarakat yang telah sadar dan mengerti tentang politik (walaupun sekecil politik praktis) gerah melihat sikap caleg seperti itu. Masyarakat berani melaporkannya kepada Panwaslu supaya mereka tidak diwakili oleh "wakil rakyat" yang belum dilantik sudah pandai menipu rakyat. Politisi busuk tersebut tidak punya tempat di hati rakyat.

Di antara caleg yang memalsukan ijazah tersebut akhirnya ada yang mengundurkan diri, gugur karena menyalahi aturan, dan ada pula yang tetap berjuang untuk menjadi "wakil rakyat". Mereka tidak pernah "menyangka" sebelumnya kalau pemalsuan ijazah akan berakibat tindak pidana dan tetap diproses pengadilan walaupun mengundurkan diri. Tindak pidana pemalsuan ijazah yang diproses pengadilan,⁷ misal di Aceh Barat (3 orang) caleg didenda

⁷Harian Serambi Indonesia, tanggal 18 maret 2004 hlm.19.

oleh Pengadilan Negeri Meulabeh sebesar Rp.700.000 sampai Rp.1.500.000. Di Langsa bahkan Wakil Ketua DPRD juga didenda oleh Pengadilan Negeri sebesar Rp.800.000., karena terbukti memalsukan ijazah untuk menjadi anggota legislatif.⁸

Isu Caleg Perempuan

UU No.12/2003 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD, pasal 65 ayat (1) disebutkan bahwa "Setiap Partai Politik Peserta Pemilu dapat mengajukan calon Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk setiap Daerah Pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%".

Isi pasal tersebut merupakan suatu himbauan dan tidak ada sanksi apapun yang dapat dikenakan (oleh siapapun, khususnya KPU kepada partai politik (parpol) apabila parpol itu mengusulkan keterwakilan perempuan kurang dari 30%.⁹

Penempatan Caleg perempuan di legislatif sebenarnya bukan terletak pada sekedar angka 30 %, melainkan bagaimana parpol dengan penuh kesadaran melihat bahwa caleg perempuan tidak kalah dengan caleg laki-laki. Dalam sistem perpolitikan demokratis dan moderen, kualitas ditentukan oleh intelektualitas (di samping spritualitas dan emosionalitas), sedangkan jenis kelamin menjadi sekunder. Tetapi, *ideal policy* (lebih demokratis, *rights centred*) tidak diartikan secara benar oleh parpol, khususnya parpol di NAD. Nyata sekali terlihat bahwa pengurus parpol hanya memenuhi kuantitas 30% caleg perempuan bukan kualitas. Itulah sebabnya nomor urut caleg perempuan hanya nomor urut besar, sedangkan nomor urut kecil

⁸Harian Serambi Indonesia, tanggal 27 maret 2004. hlm. 19

⁹Saifuddin Bantasyam, Senjakala Caleg Perempuan (Opini) dalam *Tabloid Berita Kontras* No.278 Tahun V tanggal 5-11 Februari 2004.

didominasi oleh caleg laki-laki.¹⁰

Walaupun nomor urut belum menentukan posisi caleg lolos menjadi anggota wakil rakyat, akan tetapi minimnya sosialisasi pemilu, membuat banyak pemilih tidak terlalu mengerti untuk memilih lambang dan caleg yang mereka inginkan. Akhirnya tetap saja nomor kecil yang diuntungkan. Ini tentu saja keuntungan bagi caleg laki-laki.

Kegigihan caleg perempuan dalam berkampanye tidak cukup untuk mengantar perempuan mewakili kaumnya. Hal ini terlihat dalam penghitungan suara hanya beberapa orang perempuan yang lolos menjadi anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/kota, tidak sampai 30%, seperti penyusunan caleg.

Isu Korupsi

Berbagai upaya dan cara dilakukan oleh partai politik dalam kampanye pemilu di Aceh untuk meraih pendukung dan mendongkrak perolehan suara parpol. Salah satu di antaranya adalah dengan mengangkat issue korupsi. Mereka beranggapan bahwa partainya adalah partai yang tidak korupsi dan anti korupsi dan berusaha menjauhkan opini masyarakat terhadap partai-partai yang diduga melakukan korupsi.

Hal demikian itu seperti yang terjadi pada kampanye Partai Keadilan Sejahtera, yang banyak mengangkat issue korupsi. Namun semangat anti korupsi tersebut berbuah perkara karena pihak yang dituding tidak menerima issue kampanye korupsi dari Partai Keadilan Sejahtera. Hal itu seperti yang terjadi pada Partai Amanat Nasional (PAN) yang tersinggung dengan tuduhan PKS, sehingga pihak PAN melaporkan PKS ke pengadilan dengan tuntutan ganti rugi 1,3 milyar.

Namun tuntutan tersebut akhirnya tidak sampai diproses dipengadilan karena kedua parpol itu (PKS dan PAN)

¹⁰Ibid.,

menyelesaikan secara damai. Sebagai penengah dalam perdamaian antar kedua parpol tersebut adalah Majelis Adat Aceh (MAA) Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.¹¹

Pola Kampanye

Sebelum tanggal resmi kampanye yang ditetapkan oleh KPU tanggal 11 maret 2004, para caleg dari parpol peserta pemilu di berbagai daerah NAD sudah mulai "gerilya" mencari simpatisan. Berbagai upaya dilakukan oleh caleg, ada yang membagikan kartu nama, kalender, surat yasin, kunjungan dan pembagian sembako kemasyarakatan miskin.

Dalam hubungan sosial sehari-hari, pembagian kartu nama dan atribut lainnya tentu tidak ada larangan. Akan tetapi kartu nama dan kalender yang diberikan tersebut lengkap dengan nama partai dan nomor urut caleg. Kasus kampanye di luar jadwal juga terjadi di Simeulu yaitu dengan penempelan sticker diwarung kopi, dan adapula yang melakukannya saat pelantikan pengurus parpol seperti di Aceh Jaya. Kampanye di luar jadwal melanggar UU pemilu yaitu UU No.12 tahun 2003 pasal 138.

Setelah terlebih dahulu mencuri start kampanye, tentu saja saat jadwal resmi untuk kampanye, parpol tidak menyia-nyiaikan kesempatan. Kampanye 2004 yang dilaksanakan parpol di NAD tidak jauh berbeda dengan kampanye pemilu sebelumnya. Pertunjukan hiburan dengan mendatangkan artis nasional dan lokal masih tetap tampak. Pembagian kaos dan segala atribut partai juga tetap mewarnai kampanye, bahkan pembagian uang kepada masyarakat untuk ikut kampanye masih tetap berjalan. Namun ada hal baru seperti yang dilakukan oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yaitu kampanye *door to door*.

¹¹Harian Serambi Indonesia, tanggal 31 maret 2004. hlm 17

Penutup

Pelaksanaan pemilu untuk memilih anggota legislatif telah usai dilaksanakan. Hiruk pikuk kampanye hanya menjadi kenangan, tinggal janji untuk ditepati atau tetap menjadi hutang sampai dibawa mati. Siapapun yang menjadi anggota legislatif tidaklah penting, sebab semuanya adalah "mewakili rakyat". Namun yang terpenting adalah memenuhi janji-janji mereka kepada rakyat dan berusaha untuk memenangkan hati rakyat.

Rakyat di NAD telah menyukkseskan pemilu tanggal 5 April 2004, termasuk anak-anak yang belum mempunyai hak pilih. Mereka ikut bergembira, datang meramaikan TPS baik saat persiapan maupun saat pemilihan. Seakan-akan ada kenduri besar di tempat tinggalnya, apalagi dilengkapi dengan tenda dan susunan kursi.

Pemilu yang penuh dengan

dinamika, berbagai kekhawatiran, isu-isu telah mewarnai pemilu 2004 sebagaimana yang telah penulis uraikan di atas. Akan tetapi, dinamika pemilu 2004 di NAD tidak sebatas apa yang telah diuraikan tadi, masih ada issue lainnya yang belum sempat terangkat seperti masalah kontrak sosial parpol dengan pendukungnya serta kecurangan penghitungan suara.

Pemilu babak kedua telah menunggu, tepatnya tanggal 5 Juli 2004 untuk memilih Presiden dan wakil presiden negara RI. Rakyat Aceh tentunya telah punya pilihan sendiri dan harapan baru kepada Presiden RI yang terpilih pada pemilu 2004 nanti. Hanya tinggal menghitung hari untuk membawa perubahan dalam bernegara dan berdemokrasi. Semoga dinamika pemilu 5 April 2004 telah mendewasakan rakyat di NAD untuk terus bijak dan selektif memilih orang yang mereka percayai dalam segala bidang kehidupan.

Sri Wahyuni, S.Sos adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Fenomena Pemilih dan Pengaruhnya Terhadap Melonjaknya Perolehan Suara Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera Dalam Pemilu 5 April 2004 di Banda Aceh

Oleh Seno

Pendahuluan

Suasana pemungutan suara pada Pemilihan Umum (Pemilu) tanggal 5 April 2004 di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) secara umum dapat dikatakan berjalan lancar. Sekitar 2,6 juta pemilih di daerah ini berbondong-bondong mendatangi sekitar 11 ribu Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di seluruh pelosok Aceh. Meskipun ada beberapa insiden kecil, tetapi peristiwa itu tidak sampai masuk dalam kategori gangguan pemilu. Apalagi mengakibatkan gagalnya pelaksanaan coblosan. Berdasarkan laporan hasil pengecekan ke TPS, Gubernur Abdullah Puteh mengatakan bahwa pelaksanaan Pemilu di Aceh berjalan sukses¹.

Pernyataan senada juga disampaikan oleh Tim Pemantau Pemilu dari DPR-RI, Franklin Kayhatu, yang mengatakan bahwa Pemilu di kawasan Banda Aceh dan Aceh Besar berjalan sesuai prosedur. Petugas Komite Pelaksanaan Pemungutan Suara (KPPS)nya bekerja cukup profesional, sehingga tidak ada kekhawatiran akan terjadinya penyimpangan. Masyarakat datang ke TPS-TPS secara mandiri, tanpa ada yang memobilisir. Juru bicara Koops TNI, Letkol CAJ Asep Sapari juga mengakui bahwa Pemilu di Aceh berjalan lancar. Lebih-lebih

di kota Banda Aceh, suasana coblosan berjalan sangat demokratis, kondusif, aman, tertib, lancar tanpa ada gangguan dan intimidasi².

Pada hari pencoblosan tanggal 5 April 2004 oleh Pemerintah ditetapkan sebagai libur nasional, sehingga kantor-kantor pemerintah dan swasta, perbankan, sekolah-sekolah baik negeri maupun swasta yang tersebar di kota Banda Aceh nampak sepi. Di kota Banda Aceh sejak pagi hari pukul 08.00, warga masyarakat mulai berbondong-bondong menuju Tempat Pemungutan Suara (TPS). Antusiasnya warga kota dalam Pemilu membuat beberapa pusat konsentrasi masyarakat seperti pasar-pasar dan jalan-jalan nampak lengang. Keadaan ini mengindikasikan adanya kesadaran yang tinggi dari warga masyarakat kota Banda Aceh menggunakan hak pilihnya untuk mencoblos tanda gambar partai dan calon legislatif (caleg) yang sesuai dengan hati nuraninya.

Fenomena Pemilih

Kebanyakan warga masyarakat Banda Aceh mempunyai kesadaran yang tinggi akan haknya untuk memilih sesuai dengan hati nurani dengan harapan agar hasil Pemilu dapat menghasilkan Pemerintahan yang bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) dan dapat

¹ "Pencoblosan Berjalan Lancar", dalam *Harian Serambi Indonesia*, tanggal 6 April 2004, hlm. 1.

² *Ibid.*

membawa rakyat Indonesia ke arah yang lebih baik. Namun ada juga yang tidak tahu siapa yang harus dipilih dan partai apa yang harus dicoblos. Hal ini terjadi karena mereka tidak tahu, apakah tanda gambar dan caleg yang dipilihnya itu akan benar-benar memperjuangkan nasibnya atau tidak. Berdasarkan pengalaman, para caleg dari berbagai partai ketika melakukan kampanye, mereka selalu memberikan angin surga dan berjanji membela rakyat kecil, mengentaskan kemiskinan, menekan pengangguran, memberantas KKN, menegakkan supremasi hukum, biaya pendidikan murah bahkan ada yang bilang bebas biaya sekolah, pengobatan gratis, dan segudang janji-janji yang menggiurkan, yang intinya mereka ingin membela rakyat dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Boleh dikatakan para caleg mengobrol janji bak iklan penjual kecap nomor satu. Mereka menunjukkan sikap dermawan dan rasa solidaritas yang sangat tinggi kepada masyarakat. Bahkan menjelang hari "H" Pemilu, mulai ada yang membagi sembako dan sedekah hingga jurus serangan fajar. Tak kalah gesit para juru kampanye (jurkam) dan caleg selama kampanye menabur janji-janji melalui berbagai sarana, baik media massa, kalender, stiker sampai kaos oblong. Berbagai iklan dengan biaya besar dikeluarkan dengan satu tujuan memikat hati masyarakat agar menjatuhkan pilihan untuk caleg dan partainya. Tak ada satupun partai politik yang menawarkan hal-hal yang negatif yang tidak disenangi rakyat.

Pengalaman dari pemilu ke pemilu, menunjukkan bahwa tidak semua parpol menepati janji sesuai dengan yang mereka ucapkan saat kampanye. Setelah menikmati fasilitas sebagai anggota legislatif, perubahan yang dijanjikan tidak pernah terwujud dan mereka lupa akan janji-janjinya sehingga kesengsaraan dan kemiskinan rakyat dibiarkan terus berlangsung. Ini yang membuat mereka bingung harus memilih siapa.

Sebaliknya, ada juga warga kota Banda Aceh yang justru membingungkan

para caleg yang pernah mengajaknya bergabung pada masa kampanye untuk memilih dirinya dan partainya. Kesanggupannya untuk ikut kampanye dan menerima kaos dengan tanda gambar partai, ternyata tidak menjadi jaminan untuk mencoblosnya. Ada contoh menarik ketika seorang pria separuh baya datang ke sebuah TPS dengan kaos Partai Golkar. Dia menggunakan kemeja warna putih, namun kaos Golkar terlihat mencolok di dalamnya.

Setelah memilih di TPS, dia mengatakan tidak mempunyai beban apa-apa saat mencoblos tanda gambar, nama orang, dan foto calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Ketika ditanyakan apakah dia memang memilih Golkar, dia menggeleng. Dia menyebutkan kaos Golkar yang dipakainya diberikan oleh pengurus partai itu di desanya. "Kami dikasih, siapa yang tidak mau. Kalau dikasih lima lagi, saya juga mau ambil," katanya. Kalau danapun diberikan, dia akan mengambilnya dengan senang hati karena pemberian dan tidak diminta³. Dia mendukung Partai Golkar karena memberikan kaos. Akan tetapi, mendukung bukan berarti harus memilih partai itu. Hingga penghitungan suara, lelaki itu tidak muncul lagi. Di TPS pun proses penghitungan suara hanya diikuti beberapa warga. Ada istilah pemilih menipu caleg. Katanya mendukung, setelah diberi fasilitas, ternyata memilih caleg dan partai lain.

Ada juga yang menilai Pemilu di Banda Aceh ini kurang demokratis dan ikut coblosan karena keterpaksaan. Seorang warga, Muhammad Polan (bukan nama sebenarnya) yang diperkirakan berusia 25 tahun. Ia mengatakan sebagai berikut: "*hari ini harus datang coblosan, karena jika tidak, saya khawatir akan berhadapan dengan sejumlah pertanyaan dari orang-orang yang mempersoalkan kenapa dia tidak datang.*"

³ "Pemilu di Mata Warga Aceh" dalam *Harian Kompas*, Sabtu, Tanggal 10 April 2004, hlm.24.

pada hal dia telah mendapat undangan untuk mencoblos"⁴.

Di salah satu warung kopi di Peunayong kota Banda Aceh, ada seorang warga mengemukakan alasan yang berbeda dengan pendapat di atas. Ia mengatakan bahwa "*Datang ke TPS lebih sebagai penghormatan mereka kepada pihak yang melaksanakan pemilu meskipun sebelumnya mereka merasa tidak dihormati*". Namun ada warga lain yang menimpali. Sambil minum kopi ia mengatakan, alasan datang ke TPS karena memang harus datang. Setelah ditanya, kamu mendukung siapa? Apa yang diharapkan dari hasil pemilu nanti? Seperti tanpa beban orang tersebut menjawab "*tidak mendukung siapa-siapa. Juga tidak mengharap apa-apa dari caleg, toh kalau terpilih jadi anggota dewan, juga tidak akan menolong dirinya keluar dari kemiskinan*". Setelah ditanya lagi, kamu memilih siapa, ia menjawab "*memilih yang pantas dipilih*".

Ketika penulis berada di salah satu warung kopi di kawasan Pasar Aceh, penulis melihat ada sekelompok orang membicarakan masalah pemilu. Mereka yang terlibat dalam pembicaraan adalah orang-orang yang selama ini menerima rezeki nomplok dari kenduri yang diselenggarakan oleh caleg dari salah satu partai besar di Banda Aceh. Bagi mereka itu saat-saat menjelang pemilu menjadi hari-hari yang menyenangkan. Oleh karena itu, tidak perlu heran jika di Banda Aceh, misalnya tukang becak A satu hari terlihat membawa bendera parpol B, sementara pada hari lain ia juga akan terlihat memakai kaos dan hadir pada kampanye parpol C.

Kampanye menjelang pemilu, bagi pemilik warung kopi dan beberapa tukang becak serta buruh bangunan di Banda Aceh tidak lebih dari sebuah bentuk lain dari kenduri. Artinya yang datang ke kampanye itu telah diberi kaos, nasi bungkus, dan uang minum ala kadarnya. Pada waktu lain, caleg

⁴ *Ibid.*

dari partai lain yang memberi, mereka menerima dengan senang hati pula. Tidak terkecuali tukang becak dan buruh bangunan yang siap memakai kaos, makan nasi bungkus serta menerima uang minum dari parpol tertentu.

Di sisi lain, ada anggapan yang tidak kalah menarik untuk dibicarakan. Seperti dikemukakan seorang warga Kampung Keudah, para juru kampanye (jurkam) dan para caleg itu dapat diumpamakan sebagai "mobil mogok yang minta didorong". Bahkan ada beberapa orang warga yang berani mengatakan bahwa "para jurkam di kota ini seperti jin yang tengah menjual surga di Aceh"⁵.

Perumpamaan di atas diucapkan warga karena sangat dekat dengan kehidupannya sehari-hari. Mendorong mobil mogok sering dilakukan para tukang becak. Setelah mesin mobil hidup, pemilik mobil tersebut hanya melambatkan tangan dan berlalu. Pertolongan tukang becak mendorong mobil mogok tadi hanya meninggalkan kepulan asap knalpot dan tidak meninggalkan tanda terima kasih. Jika mobil itu melintas di tempat itu lagi, mungkin tidak ada lagi salam atau lambaian tangan untuk mereka.

Kejadian-kejadian semacam itu biasa mereka alami selama sekian kali musim kampanye dalam beberapa kali pemilu sebelumnya, para jurkam yang telah mereka "tolong" itu setelah terpilih melupakan kepentingan orang-orang yang telah menolongnya mencoblos tanda gambar. Tidak ada kata terima kasih, malah mengadu ke DPRD pun diterima dengan satu kalimat: "*aspirasi bapak-bapak telah kami tampung. Hanya sebatas itu.*"

Munculnya berbagai pernyataan dan tamsilan miring dari warga masyarakat Banda Aceh, menunjukkan adanya fenomena

⁵ "Nuansa Kampanye di NAD 'Jin Menjual Surga' atau Dorong Mobil Mogok", dalam *Harian Kompas*, Tanggal 2 April 2004, hlm. 30.

pemilih yang memberikan cerminan betapa ada sesuatu yang tengah terjadi di masyarakat Banda Aceh. Bahkan Dr. Ahmad Humam Hamid, politikus dari Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, mengatakan bahwa munculnya sikap masyarakat yang demikian dianggap sebagai sebuah kewajaran⁶. Wajar dalam artian itulah sebenarnya yang tengah terjadi di sebuah tatanan masyarakat yang sebetulnya tengah memiliki persoalan sendiri yang belum tuntas, namun di sisi lain harus menyikapi pula janji-janji para jurkam dalam kampanye dengan segala macam ulah dan gaya mereka.

Munculnya sikap apatis, skeptis dan pesimis di antara warga kota Banda Aceh, menunjukkan bahwa di antara mereka ada yang sudah bosan terhadap semboyan-semboyan yang menjanjikan angin surga. Mereka tidak butuh iming-iming, janji manis, bujuk rayu dan kata-kata sebatas di bibir. Mereka membutuhkan sebuah karya yang mendatangkan kedamaian, kemakmuran, kesejahteraan dan tindakan nyata yang berdampak mengentaskan masyarakat lapis bawah dari jerat ketidak-amanan dan kemiskinan. Sampai saat ini di mata masyarakat bawah belum pernah menampakkan hasil.

Adanya berbagai macam penilaian dan tanggapan dari warga kota Banda Aceh tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Banda Aceh tidak mau didikte. Dari pada terus menerus ditipu, lebih baik balas menipu, dengan cara mendukung dan ikut meramaikan kampanye salah satu parpol, namun tidak memilih caleg dan parpol yang dinilai tidak amanah. Masyarakat mempunyai kriteria dan penilaian sendiri terhadap partai dan caleg yang dipercaya mampu mempergunakan aspirasinya, sehingga mereka tidak mempan disuap. Kebebasan berfikir dan mengekspresikan dirinya telah hidup, karenanya masyarakat

⁶Ibid.

telah berani bersikap tanpa harus takut menerima tekanan dari pihak tertentu.

Warga masyarakat sudah mampu dalam menentukan orang yang pantas memimpin bangsa ini. Karena itu, walaupun di antara mereka banyak yang ikut kampanye suatu partai, tetapi belum menjadi jaminan bahwa mereka akan mencoblos tanda gambar partai dan calegnya. Jika para caleg dan partai yang didukungnya ternyata mempunyai masa lalu yang kurang baik, maka mereka tidak memilihnya lagi dan berpaling pada partai baru yang dinilainya memberikan masa depan yang lebih baik.

Partai-partai besar yang diperkirakan keluar sebagai pemenang dalam pemilu di Banda Aceh, justru tumbang oleh partai kecil yang sebelumnya tidak diperhitungkan. Fenomena munculnya partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat yang perolehan suaranya meroket bak meteor, telah merubah peta perpolitikan di Banda Aceh dan bahkan di tingkat nasional.

Geliat Dua Parpol Kecil

Di kota Banda Aceh terjadi kejutan dalam perolehan suara. Ada partai-partai yang sudah dikenal berpengalaman dan tergolong partai besar dan bermodal besar dalam berkampanye, justru tumbang oleh partai kecil yang tidak diperhitungkan sebelumnya.

Berdasarkan hasil rekap perolehan suara Pemilu 2004, tiga dari enam Parpol yang lulus *electoral treshold* (ET) pada Pemilu 1999, yaitu PDI-P, PKB dan PBB, yang sebelumnya menempatkan empat wakilnya di dewan kota, masing-masing PDI-P 2 kursi, PKB 1 kursi, dan PBB 1 kursi hasil Pemilu 1999, kini dipastikan "tergusur" alias tidak memperoleh kursi DPRD kota Banda Aceh.

Pada Pemilu 1999 lalu, 10 kursi di antaranya dikuasai PAN, PPP 6 kursi, Partai Golkar 4 kursi, TNI/POLRI 3 kursi, PDI-P 2 kursi, Partai Keadilan (PK) – kini PKS 2

kursi, PBB, PKB dan PAY masing-masing 1 kursi.⁷

Hasil rekapitulasi perolehan suara Pemilu 2004, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) unggul di tiga daerah pemilihan (DP), selain berhasil mendominasi perolehan kursi legislatif kota, yaitu dua kursi di DP-2 Kuta Alam mengantongi 6.442 suara, Dua kursi di DP-3 Syiah Kuala – Ulee Kareng memperoleh 9.188 suara, dan dua kursi lagi di DP-4 Baiturrahman – Lueng Bata mengumpulkan 6.055 suara, juga menyabet dua kursi lagi di DP-1 Meuraxa – Kutaraja dan DP-5 Jaya Baru – Banda Raya. Dengan demikian, PKS menggondol 8 kursi legislatif kota⁸.

Partai Demokrat yang muncul sebagai partai baru dan belum banyak dikenal, menempati urutan ke lima di Banda Aceh, setelah PKS, PAN, Partai Golkar dan PPP. Partai Demokrat di Kota Banda Aceh mendapatkan empat kursi legislatif.⁹

Di banyak TPS di Kota Banda Aceh, beberapa partai besar (Golkar dan PDI-P) yang tadinya diperkirakan akan muncul sebagai pemenang, ternyata tidak demikian. PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang tidak diunggulkan justru keluar sebagai pemenang¹⁰. Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memperoleh angka terbesar di Banda Aceh, mengungguli partai Golkar, PPP dan PDI-P.

Kenyataan tersebut menunjukkan ada perubahan drastis sikap masyarakat di Banda Aceh. Pendukung fanatik secara perlahan mencair kepada pemilih murni. Kondisi ini lahir sebagai akibat munculnya kebebasan dari kungkungan politik monoloyalitas sebelumnya. Ramainya orang

⁷Di Kota Banda Aceh PDI-P, PKB dan PBB Kehilangan Kursi" dalam *Harian Serambi Indonesia*, Sabtu, 17 April 2004, hlm.3.

⁸Ibid.

⁹Ibid.

¹⁰*Tempo Edisi 12-18 April 2004, op.cit.*, hlm. 22-23.

datang ke arena kampanye tidak menjadi jaminan partai itu menuai kemenangan. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) yang mencatat pengunjung kampanye dalam jumlah sangat besar di Stadion Lhong Raya belum mampu berbuat banyak dibandingkan dengan PKS yang kini memiliki suara yang signifikan. Keunggulan PKS terlihat di enam dari tujuh kecamatan. Hanya Kecamatan Lhueng Bata yang diungguli PAN, sedangkan PKS menduduki ranking kedua. Bahkan di beberapa TPS di Kecamatan Syiah Kuala, PKS menang telak. Pada hal, simpatisan PKS yang hadir dalam kampanye pada hari yang sama di Jeulingke, Banda Aceh jumlahnya tidak banyak¹¹. Warga kota Banda Aceh sangat berharap adanya perubahan dalam kehidupan sehari-harinya yang dililit kemiskinan dan penderitaan.

Melejitnya perolehan suara PKS menjadi pembicaraan hangat kalangan masyarakat, terutama di sejumlah warung kopi di Ulee Kareng yang menjadi tempat lokasi berkumpulnya ratusan warga dari berbagai penjuru kota mulai pagi sampai petang hari. Pada umumnya pembicaraan mereka berkisar pada "bersihnya" para anggota dewan dari PKS yang selama ini berkiperah di gedung dewan¹². Meroketnya perolehan suara PKS merupakan fenomena baru dalam perpolitikan di kota Banda Aceh. Partai ini melejit karena simpati masyarakat terhadap kinerja anggota dewan dari partai tersebut yang dinilai bersih dan menunjukkan kepeduliannya pada masyarakat lapis bawah. Kampanye PKS yang menampilkan diri sebagai partai yang bersih, anti korupsi, kolusi dan nepotisme serta telah diperlihatkan oleh anggota DPRDnya selama

¹¹"Pemilu di Mata Warga Aceh" dalam *Harian Kompas*, Sabtu, Tanggal 10 April 2004, hlam. 24.

¹²"Hasil Sementara Pemilu di NAD PKS Unggul, KPU NAD : Belum Bisa Dipublikasikan", dalam *Harian Serambi Indonesia*, Rabu, Tanggal 7 April 2004, hlm. 7.

ini sangat menarik sehingga banyak warga kota Banda Aceh yang mendukungnya.

Di sisi lain, masyarakat sudah mulai bosan pada kinerja para politisi dari partai-partai besar yang dinilai ingkar janji dan dekat dengan KKN membuat masyarakat yang tadinya mendukung, beralih ke Partai Demokrat dan partai Keadilan Sejahtera.

Cara-cara yang ditempuh kader PKS dalam menyosialisasi program partai juga menarik untuk disimak. Mereka memberikan pendidikan kepada petani dan aktif terjun ke daerah yang sedang tertimpa bencana. Ketika anggota legislatif di DPRD NAD dari partai lain banyak yang terkena kasus korupsi, mobil dewan, uang studi banding dan lain-lain hingga berbuntut ke pengadilan, PKS justru tampil bersih dengan menolak semua kemewahan yang diberikan oleh negara. Fasilitas mobil dewan yang diperuntukkan anggota legislatif dari PKS diserahkan untuk kaum duafa dan fakir miskin yang dinilai lebih membutuhkan. Kenyataan seperti itulah yang membuat simpati massa untuk memilihnya.

Demikian juga perolehan suara yang dikumpulkan Partai Demokrat di Banda Aceh. Walaupun hanya menduduki ranking kelima, Partai Demokrat menunjukkan kelasnya sebagai partai masa depan yang gemilang. Partai Demokrat ini dinilai banyak kalangan sebagai partai baru yang muncul bak meteor yang siap menumbangkan partai-partai papan atas yang telah lama berkuprah di belantara perpolitikan Indonesia.

Pantauan *Serambi Indonesia* setelah di *cross chek* dengan catatan Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) kota Banda Aceh yang mengawasi jalannya penghitungan suara di seluruh TPS di Banda Aceh, menunjukkan bahwa : perolehan suara PKS untuk DPRD Kota 19.200; DPRD Provinsi 21.640 dan DPR-RI 23.975. Posisi kedua diduduki Partai Amanat Nasional (PAN) 14.530; 13.593; 14.592. Kemudian diikuti Partai Golongan Karya 8.679; 9.233; 8.158. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 8.177; 7.655; 7.896. Kemudian disusul Partai

Demokrat 6.772; 6.774; 7.801. Partai Bintang Reformasi (PBR) 4.794; 4.024; 3.825. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) 3.619; 3.761; 3.611. Partai Bulan Bintang (PBB) 1.721; 1.818; 1.543. Partai Patriot Pancasila 1.610; 1.794; 1.309. Partai Merdeka 1.333; 1.195; 1.073. PNUI 1.191; 891; 1.138. Sedangkan parpol lain mendapatkan perolehan suara berkisar seribu ke bawah.¹³

Hasil pemilu tanggal 5 April 2004 telah membuat fenomena baru yang berdampak terjadinya pergeseran dalam perolehan suara. Sebelumnya banyak orang menduga bahwa partai besar seperti Partai Golkar dan PDI-P akan mengungguli partai-partai lainnya. Namun kenyataannya justru muncul partai kecil yang tampil di luar dugaan dapat merebut pangsa suara. Partai kecil tersebut adalah PKS dan Partai Demokrat. Kedua partai ini menohok bak meteor yang membuat partai besar terkapar di Banda Aceh.

Meski tidak menang pemilu di tingkat nasional, namun sangat mengejutkan di kota Banda Aceh. Fenomena munculnya Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera membuat para analis di Banda Aceh memperkirakan kedua partai tersebut akan menjadi primadona dalam pemilihan presiden dan wakil presiden mendatang. Ada yang dinilai unggul karena tokohnya, ada pula yang dianiaya sebagai minoritas. Melonjaknya Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat membuat banyak orang Kagum sekaligus simpati.

Di tingkat nasional, Partai Demokrat mampu menembus lima besar. Sedangkan Partai Keadilan Sejahtera menempati urutan keenam. Kedua partai tersebut mampu mengalahkan dua partai lama yang sudah mapan, yaitu PAN yang dimotori oleh Amien Rais dan PBB yang dikomandani Yusril Ihsa Mahendra.

¹³ *Ibid.*

Yudoyono mampu menjadi magnet di tengah orang bingung mencari pemimpin.¹⁵

Kampanye Susilo Bambang Yudoyono di televisi yang dikemas sederhana dianggap menarik karena menjanjikan perubahan. Sebagai partai baru, jaringan komunikasinya sangat terbatas dan waktu memperkenalkan diri ke publik relatif pendek, kata salah seorang kader Partai Demokrat di Banda Aceh. Kesan SBY, begitu Susilo Bambang Yudoyono biasa disapa, sebagai korban menjadi semakin lengkap ketika ia akhirnya mundur dari kabinet Presiden Megawati, karena tidak lagi dilibatkan tugas-tugas kenegaraan. Masyarakat yang mudah bersimpati, melirik SBY sebagai tokoh yang dijagokan. Langkah strategis Susilo Bambang Yudoyono sebelum keluar kabinet pelangi Mega telah tertata rapi, kata Kusnanto Anggoro, seorang pengamat politik dari *Centre For Strategic and International Studies*¹⁶.

Nilai lebih Susilo Bambang Yudoyono juga dapat ditunjukkan pada hasil survei yang dilakukan oleh *International Foundation for Election Systems* bersama *United Nations Development Programme* dan *US Agency for International Development* pada tanggal 21 - 28 Maret 2004 yang menunjukkan sebagai calon presiden. Susilo Bambang Yudoyono lebih populer dari pada Megawati.¹⁷ Akibat kharisma Susilo Bambang Yudoyono, para pemilih tidak lagi memperhatikan visi partai. Calon anggota legislatif Partai Demokrat juga tidak diperhatikan publik. Ketua Umum Partai Demokrat, Subur Budi Santoso, adalah mantan pengurus pusat Golkar pada zaman Harmoko. Kenyataan Partai Demokrat menampung "politisi lama" diakui oleh Budi

¹⁵ "Koalisi Sembilan Segi", dalam *Tempo*, Edisi 12 - 18 April 2004, hlm. 28.

¹⁶ "Laporan Utama Tiga Menguak Takdir" dalam *Tempo*, Edisi 12 - 18 April 2004, hlm. 25.

¹⁷ *Ibid.*

Ketua Umum Partai Golkar, Akbar Tanjung mengaku terkejut dengan perolehan suara Partai Demokrat. Apalagi partai tersebut dapat menyodok ke posisi lima besar. Demikian juga PKS yang menempati urutan keenam. Menurut Akbar Tanjung, perolehan suara kedua partai baru itu patut di analisis dan dikaji¹⁴.

Pramono Anung, Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P mengatakan bahwa melonjaknya suara Partai Demokrat dan PKS adalah fenomena masyarakat perkotaan yang semakin kritis dan rasional, tak terkecuali di Banda Aceh. Bahkan sebagian besar pemilih di kota Banda Aceh yang tadinya mendukung partai-partai besar seperti PDIP, PKB, PPP, PBB mengalihkan pilihannya ke Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat yang dinilainya lebih aspiratif. Lonjakan suara pada kedua partai itu memang tidak datang dari alasan yang sama. Partai Demokrat, misalnya, diduga sangat diuntungkan oleh figur Susilo Bambang Yudoyono, yang di media selalu tampak tenang dan bijaksana. Dari pancaran wajahnya tergambar Susilo Bambang Yudoyono tokoh yang cakap, disiplin, jujur, adil, bijaksana dan bersih dari KKN. Di samping itu adanya anggapan bahwa Yudoyono sebagai tokoh yang dimarginalkan dan teraniaya oleh penguasa menimbulkan simpati para pemilih di Banda Aceh untuk mendukung dan mencoblos Partai Demokrat.

Sejak awal kemunculannya, Partai Demokrat sebenarnya bukan partai populer. Masyarakat di Banda Aceh pun belum banyak yang mengenalnya. Namanya justru melejit setelah Susilo Bambang Yudoyono mundur dari kabinet Presiden Megawati Sukarnoputri pada tanggal 9 Maret 2004. Sejak itulah, langkahnya menjadi pesaing Megawati dalam Pemilu semakin nampak. Susilo Bambang

¹⁴ "Laporan Utama Tiga Menguak Takdir", dalam *Tempo*, Edisi 12 - 18 April 2004, hlm. 24.

Santoso. Partai ini seperti keranjang sampah. Tapi kami tetap punya prinsip. kata Budisantoso yang juga Profesor Antropologi dari Universitas Indonesia.

Menurut pengamat militer M.T. Arifin, keunggulan Susilo Bambang Yudoyono lainnya adalah ia bekas tentara. Meski tidak diperintahkan, dukungan tentara di luar jalur komando sangat mungkin terjadi karena kalangan prajurit tetap menganggap Susilo Bambang Yudoyono sebagai tokoh panutan. Susilo Bambang Yudoyono mempunyai pengaruh kuat di militer. Tapi perihal dukungan militer itu dibantah Kepala Pusat Penerangan TNI-AD Mayor Jenderal Sjafriz Sjamsoeddin yaitu TNI tidak mendukung siapa pun, baik individu maupun partai, dalam pemilu legislatif maupun presiden.¹⁸

Lima tahun lalu (Pemilu 1999), lonjakan perolehan suara PDI-P disebabkan oleh karisma Mega. Kini, di tengah jatuhnya pamor Mega di Banda Aceh, diduga sebagian pemilih PDI-P, menyeberang ke Partai Demokrat dan partai Keadilan Sejahtera.

Hal yang sama juga terjadi di Partai Golongan Karya. Sebagian pemilih yang diharapkan bernaung di bawah pohon beringin diduga berpindah ke Partai Demokrat dan Partai Keadilan Sejahtera. Bahkan di tingkat nasional, tokoh Golkar seperti adik mantan Presiden B.J. Habibie, Fanny Habibie, di luar dugaan telah menyeberang ke partai tiga berlian.¹⁹ Pindahannya tokoh nasional tersebut sangat berpengaruh pada para pemilih di akar rumput, termasuk para pemilih di Banda Aceh.

Konstituen PAN pun banyak pula yang tersedot ke Partai Keadilan Sejahtera. Pada hal sebelumnya, PAN optimistis akan bertengger di peringkat tiga besar dengan perolehan 16 hingga 17, 5 persen suara. Namun nyatanya partai itu hanya masuk

deretan ke tujuh dengan perolehan suara hanya 5.49 persen.²⁰

Penutup

Fenomena pemilih di Banda Aceh yang mulai menunjukkan kecerdasannya dalam memilih partai dan caleg telah merubah peta perpolitikan. Mereka tidak dapat didikte dan menuruti keinginan para caleg dan juru kampanye. Dapat saja mereka ikut kampanye pada partai dan caleg yang telah memberikan *bungong jaroe*, namun untuk mencoblosnya, tetap pada pilihan yang dianggapnya mampu memberikan perubahan ke arah yang lebih baik.

Mempunyai dana yang besar, tidak menjamin kemenangan dalam pemilu di Banda Aceh. Hal ini terbukti munculnya dua partai kecil (PKS dan Partai Demokrat) telah mampu merubah peta perpolitikan di Banda Aceh maupun di tingkat nasional. Keluarnya Partai Keadilan Sejahtera sebagai juara satu dan Partai Domokrat sebagai juara lima, menunjukkan betapa para pemilih di Banda Aceh telah dapat menentukan siapa caleg masa depan yang terbaik.

Kedua partai kecil ini datang mengejutkan. Meskipun bukan yang terbesar. Partai Demokrat, yang baru seumur jagung, tiba-tiba masuk lima besar, baik ditingkat kota Banda Aceh maupun ditingkat nasional dalam Pemilu 2004. Perolehan suara Partai Keadilan Sejahtera berlipat lebih dari tiga kali dibanding dengan perolehan pada Pemilu tahun 1999, sesuatu yang tidak dibayangkan pengurusnya sendiri.

Memang ada benang merah antara fenomena pemilih di Banda Aceh dengan eksisnya dua partai kecil (Partai Demokrat dan partai Keadilan Sejahtera) yang menohok partai besar. Lihatlah Partai Demokrat yang belum dikenal masyarakat secara luas di Banda Aceh, mampu merebut pangsa suara hingga bertengger di lima besar merupakan kejutan yang mencengangkan banyak orang.

Di sisi lain, Partai Keadilan Sejahtera justru lebih mengejutkan lagi karena dapat meraih suara terbanyak di Banda Aceh, suatu prestasi yang luar biasa hebatnya.

Kunci keberhasilan suatu parpol bukan terletak pada besarnya modal yang dikeluarkan dan janji-janji yang mengiurkan, tetapi justru pada kejujurannya. Jika caleg dan parpol jujur dalam berkampanye dan menepati janji, serta memperjuangkan nasib rakyat maka mereka akan dipilih lagi oleh masyarakat pendukungnya.

Janji-janji yang diberikan para caleg dan juru kampanye merupakan hutang yang harus dibayar kepada masyarakat yang telah memilihnya. Mereka diharapkan mampu

membawa aspirasi para pemilih untuk memperjuangkan nasibnya agar dapat keluar dari jerat kemiskinan dan mampu membawa bangsa ini menjadi bangsa yang aman, damai dan sejahtera.

Harapan kita semua, semoga Pemilu 2004 ini dapat menghasilkan Pemerintahan yang bersih, jujur, adil dan mampu membawa bangsa Indonesia menuju hari esok yang lebih baik. Para caleg yang terpilih dapat mengemban amanah rakyat yang memilihnya dan dapat bekerja sesuai dengan keinginan rakyat dan mampu menyuarakan kepentingan rakyat dan bukan lagi sekedar slogan-slogan kosong tanpa makna.

Drs. Seno adalah Asisten Peneliti Madya pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

Pemilu dan *Good Governance* di Aceh

Oleh Titit Lestari

Pendahuluan

Pemilu merupakan salah satu bentuk demokrasi dan biasa disebut sebagai sebuah pesta demokrasi. Pemaknaan kata 'pesta' mengandung arti bahwa seluruh rakyat boleh menerapkan asas demokrasi dalam menentukan wakil-wakilnya yang akan duduk dalam pemerintahan. Tujuan pemilu adalah untuk menentukan siapakah yang akan menyelenggarakan negara pada 5 tahun mendatang.

Pemilu tahap pertama 5 April 2004 telah berakhir dan telah selesai penghitungan suaranya. Wakil-wakil yang akan duduk di DPR telah terpilih. Kepada beliau inilah kita akan menggantungkan masa depan bangsa dan negara kita. Yang menjadi pertanyaan kita saat ini apakah kita telah memilih orang-orang yang tepat untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik (*good governance*) di negara kita.

Pemilu di Nanggroe Aceh Darussalam

Nanggroe Aceh Darussalam yang merupakan salah satu daerah konflik yang ada di Indonesia yang juga ikut menyelenggarakan pesta demokrasi ini. Pemberlakuan DM (Darurat Militer) banyak membantu penyelenggaraan Pemilu tahun ini. Dibandingkan pemilu tahun sebelumnya, Pemilu kali ini dapat dikatakan lebih lancar. Pada daerah perkotaan pelaksanaan Pemilu dapat dianggap lebih lancar dibandingkan daerah pedesaan yang dikategorikan sebagai daerah hitam. Akan tetapi semakin lancarnya pelaksanaan pemilu bukan berarti akan menghasilkan suara yang benar-benar mewakili suara rakyat. Tata cara pelaksanaan Pemilu yang berbeda dengan tahun-tahun

sebelumnya telah membuat sebagian besar masyarakat tidak atau kurang mengerti bagaimana tata cara memilih wakil-wakil dalam partai.

Waktu sosialisasi yang cukup singkat kurang memberikan hasil yang optimal. Pada waktu pelaksanaan Pemilu masih banyak yang merasa bingung bagaimana cara memilih yang benar. Seperti diberitakan pada harian Serambi Indonesia bahwa masyarakat di daerah pedesaan dan pinggiran kota masih belum mengetahui secara baik dan jelas mekanisme yang pelaksanaan Pemilu, karena Pemilu tahun 2004 sangat berbeda dengan Pemilu-Pemilu sebelumnya.¹

Hasil Pemilu yang ada di NAD, yang berhak ikut serta menyelenggarakan pemerintahan sebanyak 11 partai dari 24 partai yang ikut serta sebagai kontestan pemilu 2004. Yang mendominasi kemenangan di daerah ini dengan memperoleh 12 kursi di DPR NAD adalah Partai Persatuan Pembangunan dan Partai Golongan Karya.²

Good Governance

Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan menjadi penyelenggara pemerintahan yang amanah (Bintoro Tjokroamidjojo), tata pemerintahan yang baik (UNDP), pengelolaan pemerintah yang baik dan bertanggung jawab (LAN), dan ada juga yang mengartikan secara sempit sebagai

¹ *Serambi Indonesia*, Sabtu, 7 Februari 2004, hal 3, kol.2-5.

² *Serambi Indonesia*, Kamis, 29 April 2004

pemerintahan yang bersih.³

Good Governance berkaitan dengan tata penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dalam arti sempit, *good governance* berarti penyelenggaraan pemerintahan yang baik bertalian dengan pelaksanaan fungsi administrasi negara. Menurut Sofian Effendi bahwa dalam menyelenggarakan *good governance* dalam sebuah bangsa diperlukan 3 penyangga atau pilar utama yaitu pemerintahan (state), civil society (masyarakat adat, masyarakat madani), dan masyarakat sipil.⁴

Berdasarkan uraian diatas, maka tinjauan mengenai penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) tidak hanya berkenaan dengan fungsi administrasi negara yang dijalankan oleh pemerintah, melainkan juga termasuk pada cabang-cabang kekuasaan negara yang lain seperti pembentukan undang-undang dan penegak hukum. Disamping itu bagi masyarakat banyak, penyelenggaraan pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan bersih dalam menyediakan pelayanan dan perlindungan dari berbagai tindakan sewenang-wenang baik atas diri, hak maupun harta bendanya.

Dalam kaitan pelayanan dan perlindungan, ada dua cabang pemerintahan yang berhubungan langsung dengan rakyat yaitu administrasi negara dan juga penegak hukum. Karena itu sangat wajar apabila tuntutan penyelenggaraan pemerintahan yang baik terutama ditujukan pada pembaharuan administrasi negara dan pembaharuan penegakkan hukum.

Pelayanan yang dipanjang-panjangkan atau bertele-tele (birokratisasi), bukan

³ Sofian Effendi, Membangun Good Governance: Tugas Kita Bersama, Makalah dalam Seminar Nasional Meluruskan Jalan Reformasi, Universitas Gadjah Mada, 26 - 27 September 2003

⁴ *Ibid.*

hanya memperlambat, tetapi menjadi suatu fungsi "komersial", karena melahirkan sistem "uang pelicin", "hadiah" yang tidak lain dari suatu bentuk suap. Hal serupa terjadi pada penegakkan hukum. Keadilan yang ditentukan oleh kemampuan tawar-menawar menurut hukum tawar-menawar.

Berdasarkan keadaan diatas, secara praktis usaha mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik tidak lain dari pemerintahan yang bersih, memberikan kemudahan dan berbagai jaminan bagi rakyat banyak. Dan mengingat sentuhan langsung kepada masyarakat, penyelenggaraan pemerintah yang baik tidak lain dari upaya pembaharuan sistem administrasi negara (birokrasi) dan tata cara penegakkan hukum.

Penyelenggaraan pemerintahan yang baik atau pun tidak, tidak semata-mata terjadi karena ketentuan hukum yang tidak jelas, manajemen pemerintahan yang kurang baik atau berbagai faktor tata laksana pemerintahan lainnya.

Tatanan politik yang berlaku dapat mempengaruhi bahkan menentukan baik, kurang, atau tidak baik penyelenggaraan pemerintahan. Politisasi birokrasi untuk mendukung regim politik yang berkuasa, menjadi salah satu contoh terjadinya segala bentuk sistem perkoncoan menuju pada korupsi, kolusi dan nepotisme. Lebih lanjut, politisasi birokrasi menyebabkan administrasi tidak berorientasi kepada kepentingan masyarakat, tetapi pada kekuasaan. Birokrasi menjadi tertutup dan tidak dapat terkontrol secara wajar.

Pemerintahan baik adalah wujud ideal dari penyelenggaraan sebuah negara. Pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang berdasarkan hukum dan mempunyai legalita serta diharapkan akan tumbuhnya sosial budaya masyarakat menjadi masyarakat yang madani. Untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih dan pemerintahan yang baik diperlukan orang-orang yang mempunyai kriteria-kriteria tertentu yaitu

berakhlak baik. Pada kondisi yang ada saat ini khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam apakah masih bisa diwujudkan?

Kasus penahanan 7 (tujuh) anggota DPRD Kota Banda Aceh dan mantan Walikota Banda Aceh Drs. Zulkarnain⁵ memberikan gambaran akan jauhnya penyelenggaraan *good governance* di daerah Serambi Mekah ini. Sebagai orang yang ditahan mereka berarti terindikasi melakukan kejahatan (meskipun belum diputuskan oleh pengadilan).

Fenomena yang seperti ini memberikan preseden buruk kepada rakyat akan kinerja pemerintahan. Apakah rakyat masih percaya dengan wakilnya yang mereka pilih sendiri untuk menyelenggarakan pemerintahan?

Kemudian masalah yang tidak kalah menariknya adalah adanya kasus korupsi pengadaan genset PLN dan juga pembelian helikopter PEMDA NAD yang berbau korupsi dan melibatkan pejabat penting di PEMDA NAD.⁶ Disamping itu masih panjangnya jalur birokrasi dalam setiap pengurusan surat-surat pada instansi pemerintah yang memberikan peluang akan adanya uang pelicin juga banyak terjadi di NAD ini.

Pada beberapa bulan terakhir berita yang banyak muncul pada halaman pertama media lokal (Serambi Indonesia) adalah maraknya beberapa kasus korupsi yang terjadi di Serambi Mekah ini.

Kondisi diatas menjadikan masyarakat kurang percaya dan tidak respect terhadap penyelenggara pemerintahan. Pada dasarnya kondisi ini hanya dipicu oleh adanya sumberdaya manusia yang berkualitas rendah dan tidak profesional dan kadang-kadang mereka tidak menyadari bahwa mereka adalah pelayan masyarakat. Mereka

telah lupa bahwa mereka yang memegang kunci penyelenggaraan pemerintahan adalah mereka yang telah dipilih oleh rakyat untuk mewakili suara rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan, tetapi setelah terpilih justru lupa pada massa pemilihnya.

Langkah-langkah untuk mewujudkan *Good Governance*

Langkah utama yang harus dilakukan untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab adalah dengan cara menjalin jaringan dan interaksi yang sinergik dan setara antara pemerintah, *civil society*, dan masyarakat pengusaha dalam hal penerapan otoritas politik, ekonomi, dan administrasi.⁷ Hubungan ketiga unsur ini dapat berjalan baik apabila ada standar moral dan etika yang tinggi dari penyelenggara pemerintah, kepercayaan, transparansi, partisipasi, serta supremasi hukum.

Standar moral dan etika yang tinggi dari penyelenggara pemerintah sangat diperlukan untuk kelancaran kegiatan pemerintahan yang melibatkan banyak pihak. Syarat ini berkaitan dengan sumber daya manusianya. Mulai dari rekrutmen (sebagian rekrutmen PNS dilakukan dengan dasar koncoisme atau suap) menyebabkan sumber daya manusia tidak selalu memiliki kualifikasi sebagai pengemban penyelenggara pemerintahan yang baik. Di NAD kasus koncoisme dan suap juga merebak setiap kali ada penerimaan PNS dilingkungan PEMDA. Jika memang benar hal itu terjadi bagaimana kualitas aparaturnya jika waktu mau masuk mereka sudah bertindak tidak jujur. Moral dan etika dalam menyelenggarakan pemerintahan, misalnya dalam hal pelayanan kepada masyarakat juga perlu perhatian dan peningkatan yang lebih baik sebagai salah satu cara untuk mewujudkan *good governance*.

Supremasi hukum juga menjadi salah satu tonggak utama dalam mewujudkan

penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Berdasarkan prinsip demokrasi dan supremasi hukum dapat diharapkan unsur-unsur seperti keterbukaan, dapat diawasi, akuntabilitas dan lain sebagainya. Usaha untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dilakukan seperti cara di bawah ini.⁸

1. Pertama, melanjutkan pembaharuan politik. Peraturan perundang-undangan di bidang politik yang menjadi dasar pembentukan pemerintahan baru, dapat diperbaharui. Ketentuan-ketentuan mengenai sistem pemilu, susunan MPR, DPR, dan DPRD, KPU yang independen dan lain-lain perlu ditata kembali.
2. Kedua melanjutkan pembaharuan UUD. Pembaharuan ini tidak hanya mengenai jabatan kepresidenan, tetapi perbaikan keseluruhan termasuk menyusun kembali badan perwakilan menuju sistem dua kamar. Demikian pula mengenai lembaga negara lain, disamping ketentuan-ketentuan mengenai hak asasi dan lain sebagainya.
3. Ketiga, melanjutkan pembaharuan kekuasaan kehakiman seperti sistem pemilihan hakim Agung, pertanggungjawaban hakim yang melanggar hukum, wewenang menguji tindakan pemerintahan dan peraturan perundangan di bawah UUD, masa jabatan hak dan lain sebagainya.
4. Keempat, pembaharuan administrasi negara. Melanjutkan pembebasan administrasi negara dari segala pengaruh politik. Penyusunan kembali organisasi administrasi negara. Menyiapkan daerah untuk menjalankan tatanan otonomi baru yang meletakkan titik berat penyelenggaraan pemerintahan daerah.

5. Kelima, ketegasan dalam menjalankan prinsip dan ketentuan hukum untuk menjamin kepastian, ketertiban dan keadilan hukum. Dalam kaitan dan pemikiran bentuk negara federal, perlu dibentuk Komisi Nasional untuk menyelidiki masalah federal dan juga otonomi. Usaha merampingkan administrasi negara untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas perlu ditingkatkan tanpa mengurangi asas kehati-hatian dan tidak sewenang-wenang. Memperbesar gaji pegawai dapat lebih memusatkan perhatian pada tugas-tugasnya.
6. Keenam, melakukan evaluasi terhadap segala produk hukum masa lalu, dalam rangka membangun satu tertib hukum yang utuh dan harmonis satu sama lain. Tugas ini seyogyanya dijalankan Badan Pembinaan Hukum Nasional dengan mengikutsertakan para ahli dan juga praktisi dari kalangan kampus.
7. Ketujuh, menata kembali pemerintahan desa agar mampu menjalankan pemerintahan yang bersentuhan langsung dengan rakyat banyak. Penataan ini dapat mencakup kemungkinan penggabungan desa-desa agar lebih *managable* dan mandiri.

Akankah *good governance* terwujud ?

Penutup

Masyarakat kini menghadapi situasi yang penuh ketidakpastian. Upaya pemberantasan korupsi ternyata lebih bernuansa politis daripada keseriusan untuk menegakkan hukum tanpa sikap diskriminasi. Kasus-kasus lama penyalahgunaan aset negara belum lagi tuntas diselesaikan.

Penegakan *good governance* memang membutuhkan kepemimpinan yang tegas dan mengabdikan pada kepentingan umum, bukan sikap yang menggampangkan masalah serta permainan logika dan kata-kata. Sikap tegas, tidak memihak, dan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum kiranya merupakan sumber legitimasi moral. Dalam hubungan

⁵ Serambi Indonesia, Senin, 15 Maret

⁶ Serambi Indonesia, Selasa, 16 Maret

⁷ Sofian Effendi, *Op Cit.*

⁸ Bagir Manan, Good Governance hindarkan rakyat dari tindakan negara yang merugikan. *Jurnal Transparansi* Edisi 14/Nov 1999. www.transparansi.or.id

ini, untuk menjalankan kepemimpinannya secara efektif, Penguasa Darurat Sipil Daerah membutuhkan legitimasi moral, disamping legitimasi politik yang telah diperolehnya.

Adanya beberapa kasus korupsi yang hampir muncul setiap hari pada harian lokal NAD merupakan langkah yang baik untuk menuju pembentukan *good governance* dan dapat menjadikan terapi khusus bagi para penyelenggara pemerintahan untuk bertindak di luar hukum dan undang-undang. Penindakan kasus korupsi hendaknya disertai dengan penegakan hukum yang harus tegas sehingga akan membangkitkan kepercayaan masyarakat NAD kepada pemerintahannya.

Pemilu tahap pertama telah usai dan wakil-wakil rakyat yang akan duduk di DPR/DPD telah ada dan siap menjalankan tugasnya. Kepada mereka inilah masyarakat menggantungkan harapan agar terciptanya penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Wakil rakyat inilah yang diharapkan memberikan kontrol bagi para eksekutif akan bertindak yang benar. Kasus yang terjadi di Banda Aceh yang menempatkan Partai Keadilan Sejahtera menempati posisi puncak telah memberikan gambaran bahwa rakyat merindukan figur yang benar-benar bersih dan jujur. PKS menang dalam Pemilu kali ini berkat kejujuran mereka dalam menjalankan tugasnya di jajaran legislatif. Anggota legislatif PKS yang duduk di DPRD kota Banda Aceh telah membuktikan bahwa mereka anti korupsi dengan tidak ikutnya kelompok mereka menjadi salah satu anggota DPRD kota Banda Aceh yang ditahan karena diduga melakukan tindak korupsi.

Pemimpin Daerah yang nantinya akan memimpin daerah sebaiknya benar-benar legitimasi politik dan yang lebih

penting lagi adalah legitimasi moral yaitu sikap tegas, tidak memihak, dan selalu menjunjung tinggi supremasi hukum. Idealnya mereka dipilih dari partai politik yang tidak dominan, dalam arti mereka berasal dari partai politik hasil koalisi atau partai politik kecil. Tujuannya adalah agar terjadi keseimbangan hubungan antara eksekutif dan legislatif. Kondisi ini akan memaksimalkan fungsi kontrol legislatif kepada eksekutif. Kondisi yang sekarang terjadi bahwa pemimpin pemerintahan berasal dari partai-partai yang dominan sehingga justru menyuburkan praktik "kerling mata" antara eksekutif dengan yudikatif. Dengan dalih solidaritas anggota partai makai partai yang dominan duduk dalam legislatif akan melindungi pemimpin pemerintahan yang notabene juga anggota dari partainya sendiri. Semoga praktik-praktik yang seperti ini tidak terjadi pada bumi Nanggroe Aceh Darussalam. Diharapkan siapapun yang akan memimpin NAD dan duduk dalam legislatif NAD akan mewujudkan terbentuknya penyelenggaraan pemerintahan yang baik agar kepercayaan rakyat kepada pemerintah muncul kembali dan keterpurukan bangsa yang amat sangat parah ini kembali bangkit menuju kejayaan dan kemajuan untuk menciptakan masyarakat madani.

Melalui PEMILU 2004 yang memilih Pemimpin Nasional secara langsung dengan adil dan jujur dapat menghasilkan seorang pemimpin yang memiliki legitimasi dan dipercayai rakyat untuk dapat menyelenggarakan pemerintahan yang baik. Demikian halnya dengan di Nanggroe Aceh Darussalam semoga penyelenggaraan pemerintahan yang baik segera terwujud.

Titit Lestari, S.Si adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

Netral atau Mendua (Posisi PNS NAD pada Pemilu 2004)

Oleh Sri Waryanti

Pendahuluan

Pemilihan Umum di Indonesia tahun 2004 tampil dengan format dan corak yang jauh berbeda dengan pemilu sebelumnya. Perbedaan ini diharapkan dapat memenuhi semangat demokrasi yang selalu diimpikan setiap bangsa di dunia ini. Untuk pertama kalinya pemilihan umum legislatif ini rakyat akan memilih secara langsung wakil-wakilnya yang akan menduduki kursi dewan baik Dewan Perwakilan Rakyat maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPD). Proses demokrasi juga akan dilanjutkan kembali dengan pemilihan presiden secara langsung pada tanggal 5 Juli 2004.

Kekhawatiran berbagai pihak yang menyangsikan kesuksesan pemilu berkaitan dengan tersendatnya penyaluran logistik ternyata merupakan riak-riak persiapan dalam sebuah pesta demokrasi. Oleh karena pada kenyataannya pemilu dapat berjalan dengan lancar dan berlangsung sesuai dengan jadwal. Salah satu barometer keberhasilan ini adalah pemilihan umum yang berlangsung di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang masih berstatus Darurat Militer (DM) dapat berjalan dengan lancar. Meskipun banyak pemerhati masalah Aceh menyangsikan Pemilihan Umum di Aceh dapat berlangsung secara independent terlepas dari tekanan khususnya Penguasa Darurat Militer Daerah (PDMD).

Di sisi lain peran aparat birokrasi (baca : PNS) dalam mensukseskan pemilu tidak dapat diingkari. Oleh karena aparat harus menjalankan perannya sebagai aparat administrasi dan birokrasi yang bersifat netral dan tidak memihak mana pun. Namun

mampukah dalam sebuah pesta demokrasi posisi kenetralannya dapat dipertahankan ? Tulisan ini akan menguraikan pasang surut netralitas PNS dalam pelaksanaan pemilihan umum dan keberadaan PNS dalam pemilihan umum 2004.

Pasang surut PNS dari pemilu ke pemilu

Sejarah telah membuktikan sejak pemilu 1955 posisi PNS sebagai aparat birokrasi telah diperebutkan oleh berbagai partai politik. Pada 1950 - 1960 partai politik seperti PNI, Masyumi, NU dan PKI berusaha mempengaruhi aparat birokrasi agar memberi dukungan kepada partai-partai tersebut. Dalam kondisi seperti itu sikap PNS ambivalen di mana di satu pihak mereka harus berperan sebagai aparatur pemerintah sekaligus abdi masyarakat secara luas dan di sisi lain mereka harus mementingkan kepentingan partainya. Jika menteri dari PNI maka struktur di bawahnya didominasi dari kalangan PNI. Begitu juga jumlah anggota DPRD Sumatera Utara 45 orang dan yang mewakili Aceh 11 orang. Dari wakil-wakil tersebut utusan dari PSII lebih banyak dari yang lain. Meskipun tidak berarti bahwa di Aceh lebih banyak anggota PSII, tetapi karena yang berperan selama masa awal kemerdekaan adalah Pesindo yang tokoh-tokohnya seperti Ali Hasjmy adalah PSII. Mungkin anggota Masyumi lebih banyak, tetapi yang duduk di lembaga legislatif hanya 3 orang¹. Pada Pemilu tahun 1955 Partai

¹ Thamrin Z. Sejarah dan Peranan Partai Politik di Aceh (1945 - 1997). *Atakalah Seminar*, dalam Seminar Kesejarahan tanggal 14 Juni 1997 pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh, 1997, hlm. 9.

Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) menjadi primadona dengan merebut 75,57 persen kemudian diikuti Perti dengan merebut 13,58 suara.² Kondisi seperti ini menimbulkan pengkotak-kotakan satu sama lain sehingga timbul saling curiga mencurigai.

Pada masa Orde Baru legalitas PNS dalam dukung mendukung partai semakin disahkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1970 yang menyatakan bahwa PNS dilarang masuk ke partai politik tetapi tidak untuk organisasi politik tertentu (Golongan Karya), bahkan ada ketentuan bagi PNS mempunyai kewajiban untuk memenangkan partai politik tertentu yang populer dengan istilah *monoloyalitas*.³

PNS dan netralitasnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah partai Golongan Karya. Dalam perjalanannya PNS pernah dijadikan kendaraan politik oleh Partai Golongan Karya. Pada tahun 1971 Golongan Karya dapat memenangkan Pemilu walaupun perolehan suaranya tipis. Namun pada Pemilu 1977 kembali kepada keunggulan partai bercorak Islam yaitu partai hasil fusi PPP meraih suara 57,5 persen sementara Golongan Karya meraih 41,3 persen suara. Keunggulan PPP kembali terulang pada Pemilu 1982. Meski trend perolehan suara menurun menjadi 54,3 persen, namun PPP masih menguasai 6 kursi legislatif di DPR-RI, sama dengan perolehan kursi pada Pemilu 1977. Baru pada Pemilu periode 1987 - 1997 Golkar memperlihatkan keperkasannya ketika Prof. Ibrahim Hasan yang ketika itu menjabat sebagai Gubernur Aceh memberi jalan kemenangan Golkar. Pada masa inilah era Golkar di Aceh yang paling prestisius. Dan puncaknya terjadi pada tahun

² "Perang Baru Bakal Meletus di Aceh", *Harian Serambi Indonesia*, 8 Maret 2004., hlm. 1

³ H.Irham Taufik Umri, SH., "Pemilu dan Netralitas PNS", *Harian Waspada*, 15 Maret 2004, hlm. 4.

1997 ketika seluruh daerah-daerah basis PPP serta merta dilumatkan dan dikuasai secara mutlak oleh Golkar. Sehingga pada saat itu tidak ada peluang sedikitpun bagi partai lain untuk ikut bermain dalam kancah partai perpolitikan di Aceh. Hal itu seiring dengan kebijakan Golkar secara nasional yang ingin menempatkan diri sebagai mayoritas tunggal di Indonesia. Namun pada masa itu, Kabupaten Aceh Besar merupakan satu-satunya kabupaten yang belum dapat ditundukkan oleh Golkar.⁴

Sejalan dengan perkembangan politik yang ditandai dengan suatu era kebebasan yaitu reformasi, maka reformasi juga dijalankan di jajaran PNS. Meskipun proses reformasi pada saat itu dikatakan banyak pihak sudah kebablasan bahkan tidak mengenai sasaran. PNS yang digaji melalui pajak rakyat menemukan kebebasan dalam menentukan sikap politiknya yang selama puluhan tahun telah dibelenggu oleh sistem *monoloyalitas*.

Untuk lebih menekankan kenetralannya bahkan dipertegas dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1999 yang menyatakan ada dua pilihan bagi PNS yaitu : jika berketetapan hati aktif dalam politik praktis, maka PNS harus rela diberhentikan sebagai PNS dan jika ingin tetap mengabdikan sebagai PNS atau abdi masyarakat maka ia harus rela meninggalkan panggung politik.⁵

Netralkah PNS Aceh ?

Menyimak sub bahasan di atas dapat digolongkan dalam dua permasalahan yaitu netral atau mendua. Dalam pernyataannya, pengamat politik Arbi Sanit (2003) menyatakan " Saya melihat para partai politik tetap berupaya menarik PNS dan birokrasi ke wilayah politik sebagai dukungan. Bila PNS

⁴ *Harian Serambi Indonesia*, 8 Maret 2004, hlm. 1, kolom 3-4

⁵ *Ibid.*

tidak netral akan menambah persoalan administrasi pemerintahan, siapa yang akan melayani masyarakat,.... Apa yang dikhawatirkan oleh pengamat politik tersebut perlu kita dukung dan kita sosialisasikan kepada PNS karena merupakan keinginan luhur kita bersama untuk mensukseskan pemilu dengan semangat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Dalam konteks ini netralitas PNS juga diartikan tidak memihak pada salah satu partai politik, namun menggunakan hak memilih dalam pemilihan umum. Dan apabila menjadi calon anggota legislatif atau calon DPD harus rela meninggalkan posisi sebagai PNS. Dengan kondisi yang demikian netralitas akan selalu terjaga.

Pada struktur masyarakat Indonesia budaya "ewuh pakewuh" masih dapat dilihat di mana seorang pegawai biasa akan takut kepada kepala seksi, kepala seksi akan takut kepada kepala bagiannya, demikian pula kepala bagian akan takut kepada kepala biro, kepala biro akan takut kepada kepala dinas dan akhirnya kepala dinas akan takut atau sungkan pula kepada sekretaris daerah. Selanjutnya sekretaris daerah (sekda) akan takut kepada bupati/walikota, gubernur dan seterusnya, sehingga mau tidak mau mereka akan mendukung dan taat kepada atasannya termasuk dalam hal dukung mendukung partai politik. Sehingga dengan mundurnya dari PNS menghilangkan ketakutan struktural yang sering digunakan sebagai alat untuk mempengaruhi.⁶

Kenetralan posisi PNS di Aceh juga diuji pada Pemilu 2004 di mana terdapat suatu "keanehan" salah satu caleg PNS yang tidak jadi mundur ternyata lolos sebagai caleg DPR-RI dan kemungkinan caleg tersebut telah memalsukan data diri.⁷ Selain itu puluhan calon legislatif dan calon Dewan

⁶ *Ibid.*

⁷ Caleg PNS Belum Berhenti. *Harian Serambi Indonesia*, 15 Maret 2004, hlm., 1

Perwakilan Daerah belum berhenti sebagai pegawai negeri sipil. Hal tersebut terjadi karena mereka belum melengkapi semua bahan yang disyaratkan sehingga belum dapat diproses pemberhentiannya.

Sesuai dengan ketentuan kepegawaian yang berlaku, penghentian gaji dan aktivitas seseorang sebagai PNS dapat dilakukan setelah keputusan pemberhentian/pensiun keluar. Data awal yang berhasil dihimpun Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Nanggroe Aceh Darussalam hingga hari Minggu tanggal 14 Maret 2004 jumlah PNS yang menjadi caleg baik untuk DPR-RI, DPRD NAD maupun DPRD kabupaten/kota mencapai 35 orang. Sedangkan calon DPD atau yang dikenal dengan istilah "senator" asal NAD dari PNS berjumlah 8 orang.

Dari sekian data PNS yang sudah jelas datanya adalah dari lingkungan Universitas Syiah Kuala Darussalam. Rektor Universitas Syiah Kuala dalam suratnya kepada Panwaslu NAD mengatakan bahwa di lingkungan universitas terdapat 23 orang PNS yang mengajukan permohonan mundur dari PNS untuk menjadi caleg. Akan tetapi enam diantaranya kemudian mencabut kembali permohonannya atau tidak jadi mundur dari PNS.⁸

"Tapi yang aneh adalah salah satu dari antara mereka yang tidak jadi mundur itu lolos sebagai caleg DPR-RI. Dengan adanya data seperti itu Rektor Universitas Syiah Kuala menyatakan bahwa pihaknya akan segera berkoordinasi dengan Panwaslu Pusat untuk menyelidiki kasus tersebut. Meskipun rektor juga menyatakan kekhawatirannya tentang adanya ketidakpastian hukum tentang masalah tersebut."⁹

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

Selain itu menurut Wakil Ketua Panwaslu NAD, Erismawati menyatakan bahwa banyaknya caleg dari kalangan PNS yang belum berhenti atau pensiun dini diketahui setelah pihak Panwaslu meminta klarifikasi kepada atasan mereka masing-masing. Hal ini diperlukan karena sistem *cross chek* sangat diperlukan untuk penegakkan pelaksanaan peraturan pemerintah dalam menjaga netralitas PNS.

Seruan tegas juga dikeluarkan oleh Penguasa Darurat Militer Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Mayjen TNI Endang Suwarya yang menyatakan bahwa calon legislatif dan calon senator (DPD) NAD yang berasal dari PNS dan dinyatakan lolos agar diberhentikan gajinya mulai 1 April 2004. Oleh karena disinyalir banyak calon legislatif dan calon DPD yang berasal dari kalangan PNS yang tidak mematuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1999.¹⁰

Dengan melihat fenomena di atas sikap rela meninggalkan posisi PNS dan menjaga netralitas PNS patut dipertanyakan karena muncul sikap mendua sebagai benteng apabila tidak lolos menjadi calon legislatif maupun calon DPD. Oleh karena pengertian netralitas PNS berarti: tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik, tidak memihak dan menunjukkan dukungan terhadap partai politik secara terbuka di depan publik, tidak melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik yang dilakukan partai politik, tidak menggunakan fasilitas negara dan kewenangan yang diperoleh dari jabatan untuk kepentingan partai politik. Di samping itu dalam netralitas juga ada ketentuan-ketentuannya yaitu: PNS mempunyai hak memilih sebagai warga negara sesuai dengan pilihan sendiri secara bebas, PNS mempunyai

hak dipilih, dengan ketentuan PNS yang bersangkutan harus mengundurkan diri sebagai PNS bila menjadi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota, Calon Presiden dan Wakil Presiden, supaya dapat menggunakan hak memilih dengan baik dan benar, PNS dituntut untuk mengikuti perkembangan politik, PNS tidak boleh apatis dan buta politik. Sedangkan netralitas PNS mempunyai tujuan yaitu: menjaga kekompakan dan keutuhan PNS, mencegah PNS dan birokrasi pemerintah menjadi sasaran tarik menarik partai politik, mencegah digunakannya birokrasi pemerintah sebagai alat politik partai politik, agar PNS dan birokrasi pemerintah dapat memberikan pelayanan yang adil dan tidak diskriminatif bagi semua rakyat, agar PNS dan birokrasi pemerintah berdiri di atas semua golongan dan kelompok.

Penutup

Masalah kenetralan ini sudah diatur dalam peraturan pemerintah, namun dalam implementasinya masih perlu pengawasan dari KPU dan masyarakat serta kesadaran PNS sendiri untuk tetap konsisten dengan predikatnya yang diembannya yaitu abdi masyarakat. Oleh karena sebagian PNS masih memanfaatkan celah-celah pada peraturan tersebut dengan tujuan untuk kepentingan pribadi atau golongan. Sehingga posisi PNS dalam koridor paradigma Korps Pegawai Negeri Republik Indonesia (KORPRI) yaitu: profesional, netral, demokratis, sejahtera dan mengabdikan tanpa pamrih tetap terjaga dan terpelihara.

Posisi PNS yang terbaik adalah berada di tengah-tengah (netral) seperti merujuk pada pernyataan pakar politik berkebangsaan Jerman, G.W.F. Hegel, pada abad ke-17 dalam bukunya "The Phenomology of Spirit" yang mengungkap-

kan posisi terbaik aparat birokrasi adalah sebagai pelayan di antara penguasa dan rakyat. Sebagai pelayan mereka membantu keperluan penguasa dan masyarakat untuk kepentingan umum.

Selanjutnya bagian terpenting dari posisi PNS adalah sebagai perekat bangsa sehingga tetap dapat mempertahankan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dan eksistensi Korps Pegawai Negeri tetap terjaga sebagai aparat pemerintah, abdi negara dan abdi masyarakat.

Di sisi lain pilihan bagi PNS untuk mundur apabila akan berkarir dalam politik baik sebagai caleg maupun calon DPD merupakan pilihan yang amat sulit. Oleh karena diantara sekian banyak yang sukses duduk di kursi legislatif maupun senator ternyata ada pula yang harus pensiun dan meninggalkan jabatan dalam usia muda karena tidak terpilih sebagai caleg dan sudah mundur sebagai PNS. Begitulah politik?

Dra. Sri Waryanti adalah Tenaga Teknis (peneliti) pada Balai Kajian Sejarah dan Nilai Tradisional Banda Aceh

¹⁰ Harian *Serambi Indonesia*, 25 Maret 2004.

Nenggeri Ujung Denie

Cerita ini mengisahkan tentang kehidupan seorang raja (pemimpin) yang sangat adil dan bijaksana, berbudi luhur, pengasih dan penyayang, tutur katanya sangat lembut serta berakhlak mulia. Namun dia sudah lama hidup melajang, sudah banyak gadis yang ditawarkan oleh kedua orang tuanya untuk menjadi pendamping hidupnya, tetapi semua wanita yang diperkenalkan padanya ditolak, kecuali gadis terakhir yang bernama Entan Pase yang berasal dari Negeri Antara. Cerita ini biasanya berfungsi sebagai pengantar tidur bagi anak-anak, yang di dalamnya mengandung pesan, agar setiap pemimpin berakhlak mulia, memiliki karakter yang adil dan bijaksana serta mempunyai pasangan hidup yang dapat mendukung kesuksesan kepemimpinannya. Sebab eksistensi isteri bagi seorang pemimpin merupakan cermin atau bayang-bayang dari kepemimpinannya. Baik dan buruknya kepemimpinan seseorang sangat dipengaruhi oleh baik-buruknya karakter isterinya.

Masuk belang keluer belang, masuk uten keluer uten, mungilihi arul si relem, menangkoki pematang urum baur si atas. Terang munantin gelep, gelep menantin terang. Ari serlo ku rowa lo, ari ingi ku asara ingi mi, ari serlo ku sejemat ari sejemat ku sara bulen, ari ulen ini ku ulen sarami, dekat male ku setun wan pelangkahan, baro sawah kite ike ku nenggeri ujung denie.

I nenggeri Ujung Denie ara mi we sara reje si bergeral Merkat Jomang. Tuahe gere kona bang ilen ku papah, bahgie e gere kona tu bang ilen kutona. Si bergeral judue murip, judue mate, gere ara we si mera kona ku ate rum jantung rasae.

Reje Bujang si berate kaya, si berbudi jeroh, perange belangi. Ike bercerak lagu santan mulimak I bebere, ike berperi lagu tikel berbunge idelahe, gere mera we musebut suwet musidik sasat kin sipet ni rakyate si gere berejer marah urum manat petenah. Cerak bubak peri bubo, wan jumpun gere ara mupulo wan cing gere ara mukilo, wan terbong gere mukelah tekabur rie gip ari sipete, pora pe gere ara wan ate ni reje.

Reje mumerintah gemasih urum turut payu, timah urum lumut, kasih urum sayang, gere mera terjah urum empah, kahar rum kaharollah. Ike munimang we si paling

adil, ike munyuket ku are gere lancung, munimang ku neraca gere ne angik. Nenggerie temas, rakyate kekaya, umee kekolak, empuse lelues, koro, kude, kaming, bebiri, lemu, kurik, itik nge besempak dum na simene.

Ine urum ama ni reje suntuk wan ragu rum bimang. Nomewe gere mera rane, mangane gere mera lulus tu, meninget kin anak jantung nate, suntuk gere mera iluwahi. Ituruhen polan so nume, itiloken polani bukon, silih berganti ayun bertuker sudere munemah pakat jeroh genap bise buge ara bang si masin delahe, kati lemut bang atewe buge merami we bertempat.

Berdalil ku jirim urum jisimui reje, tose nise, ike atu nge seger bilang, ike wih nge seger suket, ike gere ilen ara tene urum ilamat gerak si sawah si kona ku atewe, tose meran we pejejik lagu tersik, pejenyong lagu tolong sawah sesuk kin inyon singkih kin papan.

Ari padih ni ate jawalni inc rum ama, terketike si jeroh terbilangen si bise, itosemi we kinduri sara edangen urum mongot- mongote, berniet urum berhejet asal merani anake Merkat Jomang iluwahi, isintee kase jege kul jege use 44 lo 44 ingi. Bedil iluwah, canag iguel, koro beruwer igelih, rum

beranang itutu, reriah rum rerie gere berteteduh munurut angan kasat ejct niet ni inc rum ama.

Malc tekedir ni Allah meh semiang Esa urum semiang sunet, renye betetah nome. Enta sana bilangen ingi si sara ingi, kelem si sara kelem a ine urum ama nomewe rane, gere mugegerak lagu atang pejerangkang enggih megegemot.

Tekurik pemulo ine wet ari nomewe, gintes lagu sengongon. Kunul we menyebut, mubaca do'a muniro tulung, sana de tuah si male geh, jarak seteru selisih bele.

Inenc munyawah ni amale ku ama. Amale ne geh rasae sara jema tetuc banan. Ulue putih nge muwen, remalan pubcbongkok, kampile ikemekne, we berules upuh putih mucaya.

Pucengang we mulo ku aku. Rasae renye tetue ni sine bermanat. "Ko enti gabuk anakku". Tettapko atemu. Enti juh pikirmu. Wih wan telege gere ne mulimak itebukko. oros isuketko ari wan beberasen gere mera meh. Ike kin anakmu si bergeral Merkat Jomang nge ara judue murip judue mate so inenggeri antara Antara.

Ike nge terang atemu nge tentu langkahmu. munarapmi renyel ko rawan banan ku nenggeri Antara. Ikinteiko kase anake si bensu si bergerel Entan Pase. Akac kase bergeral Petei Ulubere. Ike nge tumung tekedir pedenmu, katamu nge musara anguk, perimu nge musara cerpa, osahkomi renyel sara tene reta si kulni atemu, kin sarat yakin tene kuet, sarat denem tene muninget. Kati kuyu keras berpenampong gelep kati terang, sapur kati perseh, kati edet berujud, ujud berkalam, piil berupe, semi bertubuh.

Kin langit lo nge terang lo nge terang kekire, ra tuen ra ara akal ara becara. Kamul renye segi pendari, perang mupangkal kerje musukut, sudere kuwen urum kiri munyawahni angan rum kasat ejct urum niet ni inc ama. Nge bulet pakat nge tirus genap.

isawahen renyel ku tuturpeibinni Merkat Jomang. Lagu si nge sawah bang gerak ku Merkat Jomang, nerah regemme salake lagu si muier-ier. Gere ilen muke awah ni ibie, Teridahe Merkat Jomang nge pujem-jem. Ara bang nisepe resie si geh si gere sesodere kusahan pe. Ukum ni until urum ibi, nge le meh lat batat kayu atu cerak ku so ki ni, ke situnin meh kekesiling si muserayon nge iuloi.

Sawahmi we pengunenni ibi ku cerak hakiket ku peri hakiki, cerak mutentu peri mupeti. "Kune de win langkah ni kami, ara ke die do'a sempenamu, kenak nateni kami male belangkah ku nenggeri Antara munemah belo sara reseck pinang sara semir menentun tuah urum petemunmu untilku. Salam semahku bayakku, jejaringku sepuluh kutatangun ku ulungku, ari ujung ni wuk sawah ku ujung ni kidingku, ari putih nate, urum utok kepalangku, alun ini ketike sibise ni, jurahku ni turah bejamut peringku ni turah besamut, iseranko kujantung ate ku tulen amis-amismu, boh engkip umuk-umukmu, boh penuh mi semangat mu untilku."

Enti kire sugangko urum tupangko ne ling ni kami ni bayakku, enti kire itulakko urum ilintangko anganni kami ni. Gerak angik enti ne ara, gelah durus atemu lagu wih si manut ku towa, gelah lagu pestakni matani lo soboh kekiremu si mucaya-caya."

"Item... kole kin tupang tunuk ni ate kami untilku, kole kin ulu tawar, si munemah berat, si munimang ringen, kole simunepat bulang ni amamu, kati nam rayat I tenumpit mu."

"Gelah bersih gelah gelis ari dedemu upuhku. Ko gere kami seruken ku wan teni si relem, gere kami ujon kowan uten mujana, gere kami tegu kubuet si salah." Kc nge ara judumu murip judumu mate, nge kul daling kolak seseran kami, kayu rubu pelongoh ni kami. Begi wetiullah begi wetiul Rrasul, buge

mutamahmi tuahmu si berpapah, bahgiemu sibertona bayakku.

Merkat Joamng teridahe pejem-jem, ulah-ulah pekseom-kesom lagu mejen isone mejen gere, sang oya sang nume. Pane asal Merkat Joamng munulesi isini atewe mununen resie iwani dedee, seangkan-angkan kedahe so maya rume kin cerakni ibie ne.

Penguneni ibie gere bersamut. Ibie nge dabuh geleson atewe gabuk nge ketar-ketur, alak kuningepe nge dabuh mencing. Beden nge taren, uku nge geh geguk munengon until ancana gere isone mejen. Giging pe nge dabuh ara, uwes pe nge subuk, munerah Item mejen kedik, mejen tungkuk, nengone mejen galak mejen gabuk.

Mangasni ibi nge pien pulung, sugi ni ibi nge mubilang suyung, gising ku kuwen gising ku kiri, cepah iganti gere burerede, melelehi uwin buge kati mera, mujaroi Item buge kati kona.

Cerak ni ibi gere meh-meh, nge meh bur nge meh paluh, ari ujung sawah ku ralik, ari uken sawah ku towa, bur paluh keding rum karang cot rata meh ibungkeri, betale ling ni ibi ancanawih musowah manut kutowa.

"Item bayaku" Isutiko mi mukune lingku, hek aku pegegelepek ari sinemi, nge sakit tungkik ni awahku, nge repek bibirku, nge masam awahku, nge kelat delahku, nge lekat rongokku, bedeteng kemiringku, nge mursa tangkolku, nge kebes tenimpuhku kunul, lingku mupayo munantin lingmu sarah patah, cerakmu sara kelimah bayakku.

Item, pis ke atemu, lugen ke rasamu mudaten kami suntuk si lagu nini, lagu igantungko kami gere betali, ijemurko gere berlo. Misel luju penggelih idemanko ku rongokku, lagu tali perapus iikotko ku pumu urum ku kidingku.

Ike pulang peringkuni gere we berterime, ike ipanangko aku konotketa-ikerat duenkomi, ike ipanangko aku naru keta ikerat

tigenko mi, matengku padi gelah terini ku tuyuh untilku, ike muripku gelah terini terbang ku langit ijo.

Mumenge ling ni ibie lagu pumi mumepar, lagu bedil mugercsek, lagu bertih musempur, Merkat Jomang muṅatang ni ulue. Tangku ling ni Merkat Jomang pepien patah.

Meh di ke ling ni ibia... ibi? Imen ibimi renyel ling ni ibia urum bersoh-bersohe, entine ara penisen si taring. Kati ni ibi pe, enti ne kin liwen, enti ne kin meku, enti kin penangisen, enti ne kin sebuku."

Elleh untilku, mutuahmu bayakku, enta beta lingmu Item sejuk atengku, bengi tubuhku Item sepenuh semangatku, lagu si gerle mien oyape jantungku win."

"Item, enta beta perimu, ike umpama kertan lagu gere ne mate melempa, ike umpamani tetusuk gerene itimpei one.

Mumenge lingmu untilku, lagu si nge muke langitku gere ne mugegur, buni si kuroroh gere ne kucak penengonku, Item terus ko mi renye ingan hat hingee, ku si die kase kami iparenko."

"Ibi kena nge beta cerak nari Ibi, ike kutulak gere bang kin jeroh, ke kuterime kin tuahe ke die kase?"

"Untilku, langkah, rejeki, petemun, mut, Tuhen simenentunne. Enta kune Item, ke munengon ku bilangan urum ku pebintangan, buge betami kase, gelahmi kin tuahte untilku."

"Ke nge beta we turah kene ibi urum ari ine ama, kena mokotdi nge ibi ku keni seber urum temetap, kedaheso nge ulah-ulah kucogahi. Enta kutimang-timang urum kurike-riku, gelah mi bang kutunungen ling nari ibia, kati enti ne ara Ibi gelcson, buge kase kati rane, kati mis mata nome, kati lulus kero ipangan."

Mumengen sut ni until, perasan ni ibie nge lagu medepetni emas sara buntul, kul

bur lagu sikulen atewe kin ling si sepatah ni, lucs lut lagu si lapangan dedee mencrima anguk ni Uwin. (Cerita ini merupakan cerita rakyat yang terdapat di kalangan masyarakat Gayo yang disadur kembali oleh Hasimi.

S.Ag. dari buku "Bunga Rapai Cerita Rakyat Gayo". Seri ke-2 pada halaman 30 - 34 yang didiskripsikan oleh Banta Cut dan Ishak Ali terbitan P2ISIB, Tahun 1983.)